

**ANALISIS KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM  
PEMBANGUNAN DESA KUALA ENOK  
KECAMATAN TANAH MERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**SADDAM.S**

**NIM : 10975008329**



**PROGRAM S.1  
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1434 H / 2013 M**

**ANALISIS KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM  
PEMBANGUNAN DESA KUALA ENOK  
KECAMATAN TANAH MERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian  
Oral Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu  
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**OLEH**

**SADDAM.S**

**NIM : 10975008329**



**PROGRAM S.1  
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1434 H / 2013 M**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA KUALA ENOK KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**Oleh:**

**SADDAM.S**

**10975008329**

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kemampuan mengantar seseorang atau sekelompok orang ketujuan, sambil menggunakan sarana yang ada sambil berpegang pada tata susila bersama. Riberu, (2003:2). Oleh sebab itu fungsi kepemimpinan sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk meningkatkan kinerja dan untuk mencapai tujuan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis kepemimpinan Kepala Desa Khususnya Dalam Melaksanakan Pembangunan di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. Dan sejalan dengan tujuan penelitian diatas, maka penulis mengambil populasi penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintahan dilingkungan desa, BPD, Kadus, RT, RW dan Tokoh masyarakat desa yang berjumlah total 51 orang. Mengingat populasi dalam penelitian ini sedikit, maka dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode sensus atau sampel jenuh yaitu seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah kuesioner, observasi dan interview. Analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan rumus persentase kemudian dilakukan pengelompokan kriteria penilaian yaitu mampu, cukup mampu, kurang mampu. Berdasarkan penelitian ini maka penulis dapat simpulkan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir masih kurang mampu, hal ini disebabkan karena Kepala Desa Belum menjalankan keseluruhan dari Kelima Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa..

**Kata Kunci : Analisis, Kepemimpinan, Pembangunan**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirhabbil'alamin* segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA KUALA ENOK KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Adapun proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, moril maupun materil. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala bimbingan, masukan, dan motivasi kepada :

1. Kedua orang tua, Ayahanda Alm Syamsuddin dan ibunda Dahlia karena dengan do'a, motivasi dan jasa baik moril maupun materil yang tak kenal lelah serta kasih sayangnya yang tiada terkira dalam membesarkan dan mendidik penulis, segudang jasa yang tidak akan pernah terbayar dengan apapun.
2. Bapak Rektor Prof. Dr. M. Nazir Karim, MA. Selaku Pimpinan, Pembantu Rektor I, II, dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak DR. Mahendra Romus, SP. M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Pembantu Dekan I, II dan III.
4. Bapak Afrizal, S.Sos, MA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara.

5. Bapak Rusdi, S.Sos, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara.
6. Bapak Drs.Alpizar, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
7. Bapak Drs.Almasri, M.Si selaku Penasehat Akademis penulis dan Dosen Konsultasi Penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen serta karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang sabar dalam memberikan bimbingan ilmu pengetahuan dan pelayanan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial selama perkuliahan.
9. Adik-Adikku tersayang : Ida Ndut sang *My Hero* walaupun anak kedua tetapi dia sanggup menjadi yang paling dewasa diantara kami, menjadi tulang punggung keluarga dan selalu siap mejadi motivator dan penyemangat penulis dikala susah maupun duka, selanjutnya 2 kurcaci kecilku Ayi dan Jay, akhirnya abang kalian lulus juga.
10. Keluarga Besarku Tante Timang, Om Ardi, Tante Tijah, Om Arpan, kak Ondeng, bang Sunar, kak Sita, bang Ifin, kak Nini dan bang Fi'i, yang telah memberikan bantuan moril maupun materil sehingga penulis dapat menghadapi tantangan dan cobaan selama ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, tak akan penulis lupakan semua jasa-jasa kalian.
11. Keluarga Besar BOR : Andi, Kobe, Black, Faisal, Heru jawe, Nanjung, Bayu dan Anto.

12. Sahabat-sahabatku serantau dipekanbaru (Beni, Ongky, Ambang, Anjang, Habil, Basir, Ahmad dan Hakim) sekarang Saddam sudah sarjana, kalian cepat nyusul.
13. Teman-teman seperjuangan Jurusan Administrasi Negara khususnya ANA C angkatan 2009 Ari, Rudi, Adi, Badrul, Bani, Bang Martin, Wawan, Irfan, Tika, Dewi, Lina dan Yeni dan semua kawan-kawan seperjuangan yang tak bisa saya disebutkan satu persatu.
14. Teman-teman KUKERTA: Adi, Ivo, Rio, Sandi, Ardi, Nia, wiya, Eno, dan Muji.
15. Semua pihak yang pernah berjasa dengan hidup dan kehidupan penulis yang tidak mampu disebutkan satu persatu.

Atas semua yang telah diberikan, penulis hanya bisa mengucapkan kata *“terimakasih yang tiada terhingga”*.

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin..

Pekanbaru, 15 Mei 2013  
Penulis,

**SADDAM.S**  
**NIM.10975008329**

## **ABSTRAK**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>

## **BAB I : PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Batasan Masalah.....	11
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Sistematika Penulisan.....	12

## **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

2.1. Pengertian Desa.....	15
2.1. Teori Kepemimpinan.....	17
2.2. Tipe-Tipe Kepemimpinan.....	21
2.3. Ciri-Ciri Kepemimpinan Yang Baik.....	25
2.4. Teori Pembangunan.....	28
2.5. Defenisi Konsep.....	33
2.6. Konsep Operasional.....	34
2.7. Penelitian Pendahuluan.....	36
2.8. Kerangka Pemikiran.....	38

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

3.1. Lokasi Penelitian.....	40
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	40
3.3. Populasi dan Sampel.....	41
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5. Teknik Analisa Data.....	43
3.6. Teknik Pengukuran.....	44

### **BAB IV : KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1. Keadaan Geografis Desa.....	50
4.2. Keadaan Penduduk.....	52
4.3. Pendidikan.....	53
4.4. Angkatan Kerja dan Jenis Pekerjaan.....	54
4.5. Kesehatan.....	56
4.6. Agama.....	57
4.7. Pemerintahan Desa.....	58

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1. Identitas Responden.....	62
5.1.1 Tingkat Pendidikan.....	63
5.1.2 Menurut Tingkat Usia atau Umur.....	64
5.1.3 Jenis Kelamin Responden.....	65



5.2.	Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa.....	66
5.2.1	Kepala Desa Sebagai Penggerak Potensi Masyarakat.....	66
5.2.2	Kepala Desa Sebagai Pembina Perekonomian Masyarakat.....	72
5.2.3	Kepala Desa Sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan Atasannya.....	78
5.2.4	Kepala Desa Sebagai Kordinator Terhadap Jalannya Pemerintahan dan Pembangunan Desa.....	83
5.2.5	Kepala Desa Sebagai Pelaksana Tugas dan Tanggung Jawab dibidang pemerintahan pembangunan dan Kemasyarakatan.....	88
5.3.	Rekapitulasi Data Penelitian.....	93
5.4.	Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepala Desa Dalam Menjalankan Perannya Sebagai Seorang Pemimpin Dalam Pembangunan Desa Kuala Enok.....	95

## **BAB VI : PENUTUP**

6.1	Kesimpulan.....	98
6.2	Saran.....	100

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka acuan pembangunan Nasional, pembangunan yang memberdayakan masyarakat di pedesaan harus menjadi pusat perhatian dan tanggung jawab bersama, karena membangun masyarakat pedesaan berarti pula membangun sebagian masyarakat Indonesia, yang selain memiliki sumber daya alam juga memiliki sumber daya manusia.

Oleh karena itu masyarakat yang bermukim dipedesaan harus dibangkitkan kesadarannya bahwa mereka memiliki potensi dan percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Pembangunan pedesaan itu sendiri merupakan pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat Indonesia yang bermukim di pedesaan. Dengan demikian daerah pedesaan merupakan titik sentral dari arah pembangunan nasional.

Modal dasar dalam pembangunan itu ialah manusia yang merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Oleh karena itu perubahan sikap mental, cara berfikir, kebiasaan dan tingkah laku masyarakat tradisional menjadi rasional objektif sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan sebuah pembangunan.

Dan dewasa ini pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya menggalakkan pelaksanaan berbagai pembangunan disegala sektor dan bidang. Pelaksanaan pembangunan ini adalah dalam rangka menyukseskan program

pembangunan nasional yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia yang seutuhnya yaitu pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Masyarakat sebagai objek pembangunan berarti masyarakat terlibat langsung atas berbagai kegiatan pelaksanaan pembangunan. Mengingat masyarakat merupakan potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya masyarakat untuk itu perlu dibina dan dikembangkan sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk prakarsa serta memperbaiki dirinya sendiri yang pada gilirannya akan semakin mampu pula untuk meningkatkan kesejahteraannya. Melalui peningkatan kemampuan tersebut, diharapkan akan juga akan terciptanya iklim yang mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi, prakarsa dan swadaya masyarakat untuk menggali sumber-sumber pendapatn asli daerahnya.

Pengertian Desa menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian diperjelas didalam Undang-Undang tersebut pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak ,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Suparmoko (2002:61) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian Desa UU nomor 32 tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Otonomi Desa yang merupakan otonomi asli telah diamanatkan dalam konstitusi Republik Indonesia yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2), yaitu sebagai berikut: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 7 huruf b juga memberikan gambaran dalam pelaksanaan otonomi desa secara luas, nyata, bertanggungjawab, dimana di dalamnya disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan, dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *Pertama*, factor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, factor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, factor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, factor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, factor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, factor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Keberhasilan sebuah pembangunan pada suatu daerah sudah pasti harus didukung pula oleh Aparatur Pemerintahan Desa yang mengerti dan memahami tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa, mampu melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam hal ini Kepala Desa yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya, karena dia adalah pemimpin yang memiliki kapasitas selaku koodinator dalam pembangunan di desa.

Menurut pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum peraturan desa dijelaskan bahwa tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Membina kehidupan masyarakat desa
- c. Membina perekonomian desa
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban desa
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- f. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dapat menunjukkan kuasa hukumnya.

Idealnya untuk mendapatkan hasil pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat setempat, Kepala Desa diharapkan mampu melaksanakan fungsi kepemimpinannya sebagai pemimpin dari desanya, karena Kepala Desa memiliki peranan penting dalam keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa. Kepala Desa dapat menggunakan wewenangnya untuk mengkoordinir mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan evaluasi hasil dari pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan fisik di wilayah pemerintahannya, yang tentunya kesemuanya itu harus dilaksanakan secara efektif, efisien bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Desa Kuala Enok adalah sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki 18 RT dan 6 RW. Desa ini



dibagi menjadi 5 Dusun, yaitu Dusun Kampung Baru, Dusun Lorong Tengah, Dusun Lorong Perigi, Dusun Komplek AEC dan Kampung Jawa.

Saat ini Desa Kuala Enok dipimpin oleh seorang Kepala Desa bernama Sultan Kadir yang baru menjabat selama satu periode masa jabatan, yaitu dari tahun 2009 hingga sekarang, menggantikan Kepala Desa sebelumnya melalui proses Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) dan beliau terpilih dengan suara terbanyak. Latar belakang pendidikan terakhir beliau adalah hingga sekolah menengah atas, sebelum menjabat Kepala Desa beliau menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Desa, jadi setidaknya pengalaman beliau sebagai Kepala Urusan bermanfaat bagi beliau ketika menjabat menjadi Kepala Desa. Selama masa kepemimpinan Kepala Desa saat ini, dapat terlihat kemajuan yang cukup pesat di Desa Kuala Enok ini. Kemajuan ini dapat terlihat dari pembangunan yang bersifat fisik seperti sarana dan prasarana masyarakat, semenisasi jalan, pembangunan Tanggul penahan Air laut, pengadaan PLTD dan lain sebagainya yang kesemuanya ini akan dapat berdampak langsung bagi perekonomian masyarakat yang akhirnya dapat menunjang kesejahteraan masyarakat Desa Kuala Enok.

Pada tahun anggaran 2011/2012 di Desa Kuala Enok terdapat beberapa titik pembangunan fisik yang didanai oleh dana APBD Kabupaten Indragiri Hilir dan Swadaya Masyarakat. Adapun jumlah dan jenis pembangunan fisik yang ada di Desa Kuala Enok pada tahun 2011/2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Dari data pembangunan yang diatas dapat dilihat bahwa pembangunan di desa Kuala Enok sudah cukup memadai, hal ini penulis lihat berdasarkan penilaian penulis yang telah melakukan pra survey tanggal 12-13 Desember 2012 di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah sebelumnya. Penulis melihat bahwa berbagai pembangunan telah banyak direalisasikan, diantara pembangunan tersebut ialah sarana dan prasarana infrastruktur seperti rehab dan pembangunan jalan, pembangunan dan renovasi tempat ibadah, perluasan kawasan pelabuhan, sarana olahraga dan lain-lainnya. Dengan membandingkan dengan pembangunan fisik oleh Kepala Desa sebelumnya, maka dapat penulis nilai bahwa pembangunan fisik pada masa Kepemimpinan Kepala Desa saat ini telah cukup baik.

Namun disamping realisasi pembangunan yang telah berjalan, terdapat pula fenomena-fenomena yang penulis temukan ketika mengadakan pra survey di Desa Kuala Enok tersebut yang telah penulis rangkum sebagai berikut:

1. Pengadaan barang atau bahan-bahan pokok seperti kayu, semen dan lain sebagainya didalam pelaksanaan pembangunan tersebut masih sering terjadi keterlambatan waktu kedatangan, hal ini disebabkan karena barang dan bahan tersebut didatangkan dari luar daerah. Dan lagi, Desa Kuala Enok merupakan daerah yang untuk mencapainya masih harus melalui perjalanan laut dan sungai oleh karena pembangunan jalan darat hingga kini belum selesai sepenuhnya terutama medannya yang sangat berat dan

dalam perjalanan sering terjadinya hambatan seperti rasia, dan lain sebagainya.

2. Realisasi Pembangunan tidak sepenuhnya tercapai menurut keinginan masyarakat dan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut terlihat kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu kepada latar belakang di pembahasan sebelumnya dan juga sesuai dengan judul yang akan di analisis kemudian, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Bagaimana peranKepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir”**.

### **1.3. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tepat sasaran, maka permasalahan dibatasi pada Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa serta bagaimana perannya terhadap Pembangunan di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **a. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana peranan Kepala Desa dalam proses Pembangunan di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

##### **b. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai penambah wawasan dan ilmu bagi penulis, khususnya bidang Ilmu Administrasi Negara.
2. Sebagai masukan dan informasi yang dapat berguna bagi Kepala Desa untuk lebih dapat meningkatkan dan berperan aktif dalam proses pembangunan di Desa Kuala Enok.
3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bermaksud sebagai gambaran dari rencana penulisan skripsi ini serta memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi enam bab dan merupakan kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, antara lain:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Hipotesa, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan tentang Teori Kepemimpinan, Teori Pembangunan, Defenisi Konsep, Defenisi Operasional dan Kerangka Pemikiran.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data dan Tipe Penelitian,.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada Bab ini akan diuraikan tentang Monografi Desa, Keadaan Penduduk, Jenis dan Mata Pencaharian, Tingkat Pendidikan, Agama dan Kondisi Objektif Pemerintahan Desa.

## **BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang Identitas Responden, Tingkat Pendidikan, Usia Responden dan Pembahasan Hasil Penelitian.

## **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini dikemukakan kesimpulan penelitian sesuai dengan hasil yang ditemukan dari pembahasan serta saran yang diharapkan berguna bagi kebijakan terkait tentang pembangunan Desa Kuala Enok. Dengan keterbatasan penelitian diharapkan akan ada perbaikan bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Desa**

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang perangkat Desa di dalam pasal 1 point (g) bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia mempunyai sifat keanekaragaman, sehingga terdapat bermacam-macam sebutan untuk pengertian yang sama di masing-masing wilayah di tanah air kita, termasuk di dalamnya terdapat ditemukan bermacam-macam peristilahan untuk pengertian Desa.

Berikut pengertian tentang Desa menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 5, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut B.N Marbun (2006:15) mengemukakan bahwa: “Desa ialah sebagai suatu Daerah yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan

kekeluargaan atau ikatan sosial yang yang tinggi/menetap disuatu Daerah dengan adat istiadat yang dijadikan sebagai landasan hukum dan mempunyai seorang pemimpin formil yaitu Kepala Desa”.

Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 2004:15, Yuliati, 2003:24).

Menurut Bouman (dalam Beratha, 1982:26) mengemukakan bahwa: “Desa adalah sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial”.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah bahwa : “yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004)”.



Dengan demikian bahwa pemerintah desa adalah pemerintahan yang terendah yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri.

## **2.2. Teori Kepemimpinan**

Kepemimpinan merupakan inti dari manajemen karena kepemimpinan merupakan motor penggerak bagi sumber daya dan alat-alat, manusia dan alat lainnya dalam suatu organisasi. Demikian pentingnya peranan kepemimpinan dalam usaha mencapai suatu tujuan organisasi sehingga dapat dikatakan bahwa sukses atau kegagalan yang dialami suatu organisasi sebagian besar ditentukan oleh orang-orang yang diserahi tugas memimpin dalam organisasi itu.

Hadari dan Martini (2006:21) kepemimpinan merupakan seni menempatkan bakat sebagai yang penting dan berpengaruh besar terhadap kemampuan mewujudkannya. Bakat kepemimpinan seperti bakat lain yang dimiliki setiap orang namun berbeda kualitas dan kuantitasnya, antara yang satu dengan yang lainnya, berdasarkan pendapat ini berarti kepemimpinan akan berlangsung efektif dan efisien ditangan orang-orang yang kuantitas bakatnya besar dan kualitasnya tinggi.

Siagian (2004:30) karena pada hakikatnya seorang pemimpin ialah orang yang mempunyai bawahan. Sukses atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan tergantung bagaimana cara mereka memimpin organisasinya.

Sedangkan pengertian dari kepemimpinan itu sendiri menurut Horlitz dan Cryill O'Donnell (1927 dalam Agustino 2006:6), menyatakan bahwa kepemimpinan adalah seni membujuk untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dengan semangat keyakinan.

Selanjutnya kepemimpinan menurut Orndway tead (dalam Agustino, 2006:12) ialah kemampuan untuk mengajak atau mengarahkan orang-orang tanpa memakai kekuatan formal jabatan luar.

Kepemimpinan itu sendiri merupakan salah satu aspek penting dalam bidang ilmu pemerintahan, khususnya administrasi negara. Sedangkan ilmu administrasi adalah ilmu sosial dan merupakan salah satu perkembangan ilmu filsafat. Kepemimpinan dimaksudkan dalam katagori “ilmu terapan” dan ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan teorinya diharapkan dan bermanfaat bila dilaksanakan dalam meningkatkan taraf hidup manusia.

Kartono menjelaskan dalam bukunya “*pemimpin dan kepemimpinan*” (2004:27) manusia secara bersama-sama selalu membutuhkan kepemimpinan. Untuk berbagai usaha dan kegiatannya diperlukan upaya yang terencana dan sistematis dalam melatih dan mempersiapkan pemimpin baru. Oleh karena itu, banyak studi dan penelitian dilakukan orang untuk mempelajari masalah pemimpin dan kepemimpinan yang menghasilkan berbagai teori tentang kepemimpinan. Teori kepemimpinan merupakan penggeneralisasian suatu seri perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya, dengan menonjolkan latar belakang historis, sebab-sebab timbulnya kepemimpinan, persyaratan

pemimpin, sifat utama pemimpin, tugas pokok dan fungsinya serta etika profesi kepemimpinan.

Menurut Tead; Terry; Hoyt (dalam Kartono, 2004:30) Pengertian Kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok.

Sedangkan menurut Young (dalam Kartono, 2003:30) Kepemimpinan yaitu bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus.

Selain itu juga kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mendorong atau mempengaruhi sejumlah orang atau bawahan. Bahwa sesungguhnya keektivitas kepemimpinan seseorang pada akhirnya dinilai dengan menggunakan kemampuan dalam mengambil keputusan sebagai kriteria utama.

Sedangkan (Riberu, 2003:2) mendefinisikan kepemimpinan ialah mengantar seseorang atau sekelompok orang ketujuan, sambil menggunakan sarana yang ada sambil berpegang pada tata susila bersama.

Dalam bahasa Indonesia “ Pemimpin” sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala

penuntun, raja, dan lain sebagainya. Dalam Sebuah pemerintahan desa, yang menjadi pemimpinnya adalah seorang Kepala Desa.

Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha untuk memberikan penjelasan dan interpretasi mengenai pemimpin dan kepemimpinan dengan mengemukakan beberapa segi antara lain : Latar belakang sejarah pemimpin dan kepemimpinan Kepemimpinan muncul sejalan dengan peradaban manusia. Pemimpin dan kepemimpinan selalu diperlukan dalam setiap masa. Sebab-sebab munculnya pemimpin

Ada beberapa sebab seseorang menjadi pemimpin, antara lain:

- a. Seseorang ditakdirkan lahir untuk menjadi pemimpin. Seseorang menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri.
- b. Seseorang menjadi pemimpin bila sejak lahir ia memiliki bakat kepemimpinan kemudian dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman serta sesuai dengan tuntutan lingkungan.

Untuk mengenai persyaratan kepemimpinan selalu dikaitkan dengan kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan.

Dari beberapa pengertian kepemimpinan yang disebutkan oleh para ahli diatas dapat diambil intisarynya yaitu ada dua macam yang dominan yaitu mempengaruhi dan saling mempengaruhi. Perbedaan antara mempengaruhi mengandung kesan searah, sedang saling pengaruh mengandung makna timbal balik (Agustino, 2006:25) menegaskan definisi dari kepemimpinan yang mudah

dipahami adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

### **2.3. Tipe-Tipe Kepemimpinan**

Pengertian tipe kepemimpinan menurut Tampubolon (2007) adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, ketrampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya.

Berdasarkan definisi tipe kepemimpinan diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mengarahkan, mempengaruhi, mendorong dan mengendalikan orang lain atau bawahan untuk bisa melakukan sesuatu pekerjaan atas kesadarannya dan sukarela dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam praktiknya, dari ketiga gaya kepemimpinan tersebut berkembang beberapa tipe kepemimpinan; di antaranya adalah sebagai berikut (Siagian, 2003:31).

#### **1. Tipe Otokratis**

Seorang pemimpin yang otokratis ialah pemimpin yang memiliki kriteria atauciri sebagai berikut:

- a. Menganggap organisasi sebagai pemilik pribadi;
- b. Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi;
- c. menganggap bawahan sebagai alat semata-mata;

- d. Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat;
- e. Terlalu tergantung kepada kekuasaan formalnya;
- f. Dalam tindakan penggerakannya sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan bersifat menghukum.

## 2. Tipe Militeristik

Perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dari seorang pemimpin tipe militerisme berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Seorang pemimpin yang bertipe militeristik ialah seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat berikut :

- a. Dalam mengerjakan bawahan sistem perintah yang lebih sering dipergunakan;
- b. Dalam menggerakkan bawahan senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya;
- c. Senang pada formalitas yang berlebih-lebihan;
- d. Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan;
- e. Sukar menerima kritikan dari bawahannya;
- f. Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.

## 3. Tipe Paternalistik

Seorang pemimpin yang tergolong sebagai pemimpin yang paternalistik ialah seorang yang memiliki ciri sebagai berikut :

- a. Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa;
- b. bersikap terlalu melindungi (*overly protective*);

- c. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan;
- d. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif;
- e. Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya;
- f. Sering bersikap maha tahu.

#### 4. Tipe Karismatik

Hingga sekarang ini para ahli belum berhasil menemukan sebab-sebab-sebab mengapa seseorang pemimpin memiliki karisma. Umumnya diketahui bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya tarik yang amat besar dan karenanya pada umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya yang sangat besar, meskipun para pengikut itu sering pula tidak dapat menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin itu. Karena kurangnya pengetahuan tentang sebab musabab seseorang menjadi pemimpin yang karismatik, maka sering hanya dikatakan bahwa pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan gaib (*supra natural powers*). Kekayaan, umur, kesehatan, profil tidak dapat dipergunakan sebagai kriteria untuk karisma.

#### 5. Tipe Demokratis

Pengetahuan tentang kepemimpinan telah membuktikan bahwa tipe pemimpin yang demokratislah yang paling tepat untuk organisasi modern. Hal ini terjadi karena tipe kepemimpinan ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Dalam proses pergerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia;
- b. Selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari padabawahannya;
- c. Senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya;
- d. Selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan *teamwork* dalam usahamencapai tujuan;
- e. Ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepadabawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian diperbaiki agarbawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, tetapi lebihberani untuk berbuat kesalahan yang lain;
- f. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih suksesdaripadanya;
- g. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagaipemimpin.

Secara implisit tergambar bahwa untuk menjadi pemimpin tipe demokratisbukanlah hal yang mudah. Namun, karena pemimpin yang demikian adalah yangpaling ideal, alangkah baiknya jika semua pemimpin berusaha menjadi seorangpemimpin yang demokratis.

Menurut Heidjrachman dan Husnan (2002:173) seorang pemimpin harusmemiliki sifat *perceptive* artinya mampu mengamati dan menemukan kenyataan darisuatu lingkungan. Untuk itu ia harus mampu melihat, mengamati, dan memahamikeadaan atau situasi tempat kerjanya, dalam artian bagaimana para bawahannya,bagaimana keadaan organisasinya, bagaimana situasi penugasannya,



dan juga tentang kemampuan dirinya sendiri. Ia harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Maka dari itu dalam memilih gaya kepemimpinan yang akan digunakan, perlu dipertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya

#### **2.4. Ciri Kepemimpinan Yang Baik**

Selanjutnya menurut Siagian (2003:39) dapat diketahui bahwa tugas terpenting dan terutama pemimpin ialah untuk memimpin orang, memimpin pelaksanaan pekerjaan, dan menggerakkan sumber-sumber material, maka untuk melaksanakan tugas dengan baik seorang pemimpin harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memiliki kondisi fisik yang sesuai dengan tugasnya
2. Berpengetahuan Luas
3. Mempunyai keyakinan bahwa organisasi akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui bakat kepemimpinannya
4. Mengetahui dengan jelas hakiki dan kompleksitas dari tujuan yang hendak dicapai
5. Memiliki stamina (daya kerja) yang besar
6. Gemar dan cepat mengambil keputusan
7. Adil dalam memperlakukan bawahan
8. Objektif dalam arti dapat menguasai emosi dan lebih banyak mempergunakan rasio
9. Menguasai prinsip-prinsip human relation

10. Dapat dan mampu bertindak sebagai penasehat, guru dan kepala terhadap bawahannya
11. Menguasai teknik berkomunikasi
12. Mempunyai gambaran yang menyeluruh tentang semua aspek kegiatan organisasi

Selain itu Ordway Tead dalam Winardi (2000:8) menyebutkan sejumlah sifat yang dianggap perlu dimiliki oleh seorang pemimpin adalah:

1. Energi, fisik dan Syaraf
2. Sifat mengenai tujuan dan arah
3. Sifat ramah dan efeksi
4. Anthusiasme
5. Integritas
6. Kemampuan Teknis
7. Dapat mengambil keputusan
8. Intelegensi
9. Kemampuan untuk mengarahkan sesuatu
10. Kepercayaan

Proses atau rangkaian kegiatan menggerakkan itu berarti juga menuntun dan membimbing agar seseorang pemimpin atau sejumlah orang melakukan sesuatu kegiatan yang dikehendaki pemimpin atau sesuai dengan tujuan bersama. Kegiatan itu juga berarti kemampuan memotivasi seseorang atau sejumlah orang agar bersedia melakukan sesuatu.

Dari uraian kepemimpinan Riberru (2003:2) mengatakan bahwa, orang giat memimpin karena mempunyai kemampuan untuk itu karena mampu memimpin orang lalu dihormati, disegani, dan karena memiliki wibawa. Kepemimpinana digunakan dalam 3 hal, yaitu:

1. Usaha/kegiatan memimpin
2. Kemampuan menjalankan usaha tersebut
3. Wibawa yang menyebabkan orang yang dianggap memimpin

Siagian (2003:75) salah satu konsikkuensi yang logis dari kenyataan yang ada bahwa ciri-ciri dari kepemimpinan digunakan atau ditonjolkan dengan bobot intentitas yang berbeda, artinya berbagai ciri yang dimiliki oleh seseorang pemimpin tidak seluruhnya digunakan secara serentak dengan penggunaan yang sama.

Siagian (2003:75) menyatakan bahwa ciri kepemimpinan yang ideal adalah:

1. Pengetahuan yang luas
2. Keterampilan berkomunikasi secara efektif
3. Keterampilan mendidik
4. Rasionalits
5. Objektifitas
6. Kemampuan membedakan yang umum dan khusus
7. Keteladanan

Kemudian Chester I Bernand dalam Winardi (2000:84) menyatakan bahwa kepemimpinan itu memiliki dua aspek, yaitu:

1. Aspek superioritas individual dalam bidang teknik kepemimpinan, seseorang yang menonjol dalam hal fisik, skill, teknologi, persepsi, pengetahuan, ingatan dan imajinasi akan menimbulkan kekaguman dan ia dapat memimpin bawahan
2. Aspek Superioritas dalam hal determinasi, Presistensi, Ketahanan dan Keberanian.

Kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil interaksi otomatis antara dan individu-individu yang dipimpin. Kepemimpinan bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu demi pencapaian satu tujuan.

## **2.5.Teori Pembangunan**

Dalam buku Talizi Duhu Ndara yang berjudul *Kybernology* istilah “pembangunan” berasal dari kata “bangun” Sebagai konsep pembangunan mempunyai lima arti : pertama sadar, kedua bangkit ketiga bentuk, keempat membuat atau mendirikan, kelima mengisi atau membina. Terdapat sejumlah konsep yang berkaitan erat dengan konsep pembangunan tersebut. Konsep itu antara lain adalah pengembangan (*Development*), pertumbuhan (*Growl*),

Rekontruksi (*Reconstruction*), Modernisasi (*Modernization*), Westernisasi (*Westernization*), perubahan sosial (Social), Pembebasan (*liberation*), Perubahan (*Innovation*), Reformasi (*Reformation*) dan Penemuan Kembali (*Reinvention*).

Menurut Don Murdono dan Tumpal P. Saragi (dalam Hikmat, 2004:1) memberikan pengertian bahwa pembangunan itu merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik.

Tidak jauh berbeda pendapat yang dikatakan Rivai (dalam Hikmat, 2004:51) menurutnya pembangunan itu ialah suatu proses perubahan kearah kehidupan yang lebih baik, hal ini harus dapat dilakukan dengan pendekatan interdisipliner melalui berbagai disiplin ilmu.

Pembangunan merupakan perubahan yang disengaja atau perubahan yang direncanakan secara sistematis, komperhensif (terpadu) dan menyatu (terintegrasi) untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. (M.Djadijono, 2006:242)

Visi pembangunan secara umum adalah terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan setia kepada pancasila dan UUD 1945 (Dwidjowito, 2001:41). Pembangunan berarti suatu proses rekayasa sosial maupun teknis (sosial and tehcnical engineering), yang dimaksudkan sebagai tindakan interventif untuk mengatasi masalah dan atau kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara

alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005:132).

Menurut Sudriamunawar (2002:15) pembangunan diartikan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu, perencanaan dan pendayagunaan potensi alam, manusia dan budaya sosial.

Selanjutnya Haryono Sudrimunawar (2002:17) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan serta menentukan masukan-masukan yang menyeluruh, berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara.

Secara singkat dari pengertian tersebut bahwa pandangan atau pola pikir ilmu terhadap pembangunan pada dasarnya merupakan transformasi sosial masyarakat yang semula berorientasi ekonomi.

Pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditumpahkan oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building) (Sondang P Siagian, 2000:4).

Menurut Ginanjar Kartasmita (dalam Riyadi, 2004:4) pembangunan, yaitu sebagai suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Menurut Kunarjo (2002:24) tujuan pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pemerataan pembangunan antar daerah.

Menurut Caroline Bryant dan Loise Whitec (dalam Ndraha, 1990:15) menyebutkan bahwa pembangunan ini adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk memperngaruhi masa depannya. Sebaliknya ia mengatakan ada lima implikasi utama dari defenisi tersebut, implikasinya adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan yang berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*).
- b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai kesejahteraan (*equity*).
- c. Pembangunan berarti meanruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan disini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memilih (*empowerment*).
- d. Pembangunan berarti mengurangi kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*).
- e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu dengan negara lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati(*interdependence*).

Dari berbagai definisi pembangunan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan adalah perubahan, maksudnya mengubah sesuatu yang ada supaya bisa menjadi lebih baik lagi, dan juga membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada. Pembangunan yang dimaksud adalah pertumbuhan, yang dilakukan secara sadar, rencana yang tersusun rapi dan cita-cita akhir dari perjuangan bangsa dan Negara.

Pembangunan Desa adalah suatu proses dengan nama usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat kedalam kehidupan bangsa dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada pembangunan sosial, (Taliziduhu Ndara, 1999:11).

Menurut Hatta dalam Muzani (1993:233) Pembangunan sebagai usaha untuk memobilisasi masyarakat dalam rangka memperbaiki kondisi mereka, bagi pembentukan masyarakat baru. Maksudnya pengertian ini mencakup pendidikan masyarakat dan pembangunan budaya.

Pembangunan merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam, menurut Johan Galtung dalam Trijono (2007:3).

Menurut Tjokroamidjojo dan Mustopadijaya (1993) dalam Hamim (2003:2) pembangunan adalah sebagai kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah suatu kondisi masyarakat bangsa/nasional



menuju kondisi yang lebih baik lagi menyangkut sikap, pola pikir dan kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat bangsa/nasional.

## **2.6. Defenisi Konsep**

Konsep merupakan suatu hal abstrak yang dibentuk dengan menggenralisasikan hal-hal khusus dan digeneralisasikan sebagai suatu volume. Dalam hal ini untuk memberikan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang diteliti. Adapun defenisi konsep yang diajukan sehubungan penelitian ini :

1. Kepemimpinan merupakan motor penggerak bagi sumber daya dan alat-alat, manusia dan alat lainnya dalam suatu organisasi kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pimpinan, mempengaruhi orang lain untuk bekerjasama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan penulis Kepemimpinan. Demikian pentingnya peranan kepemimpinan dalam usaha mencapai suatu tujuan organisasi sehingga dapat dikatakan bahwa sukses atau kegagalan yang dialami suatu organisasi sebagian besar ditentukan oleh orang-orang yang disertai tugas memimpin dalam organisasi itu.
2. Kepala Desa merupakan pemimpin Eksekutif di Lembaga pemerintahan desa. Kepala Desa juga merupakan aktor utama dari suatu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan evaluasi dari berbagai

pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan fisik dalam wilayah pemerintahan suatu Desa.

3. Pembangunan merupakan kegiatan membangun yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, baik itu bersifat fisik (bangunan, jalan,sekolah, dan lain-lain) atau pembangunan bersifat rohani (segala hal hal yang berkenaan dengan agama).
4. Pembangunan Desa adalah merupakan suatu proses dengan mana usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat kedalam kehidupan bangsa dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada pembangunan nasional.

## **2.7. Konsep Operasional**

Guna menghindari perbedaan persepsi dan perbedaan interpretasi atas indikator yang ada dalam penelitian ini, maka disini penulis menguraikan terlebih dahulu beberapa konsep yang terkandung di dalam penelitian atau yang menjadi konsep operasionalnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2 pasal 14 menyatakan bahwa Kepala Desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan

ketentraman dan ketertiban. Untuk menjalankan tugas tersebut, maka Kepala Desa mempunyai fungsi yaitu:

- a. Menggerakkan potensi masyarakat.
- b. Membina perekonomian desa.
- c. Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya.
- d. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Desa.
- e. Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berikut adalah tabel mengenai konsep operasional dari penelitian yang akan penulis lakukan dengan memakai konsep sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 yakni kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

**Tabel 2.1 Konsep Operasional**

<b>Defenisi Konsep</b>	<b>Indikator</b>
Kepemimpinan Kepala Desa merupakan Kepemimpinan Eksekutif di Lembaga pemerintahan pada suatu desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemampuan Kepala Desa dalam menggerakkan potensi masyarakat</li> <li>2. Kemampuan Kepala Desa dalam membina perekonomian desa</li> <li>3. Kemampuan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dari atasannya</li> </ol>

	<p>4. Kemampuan Kepala Desa sebagai pelaksana koordinasi terhadap jalannya pemerintahan desa</p> <p>5. Kemampuan kepala desa dalam melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya</p>
--	--

## 2.8. Penelitian pendahuluan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap penelitian yang ada, penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa, yang penulis jadikan sebagai bahan referensi atau acuan dalam membuat penelitian ini, agar dapat membuat penelitian ini jadi lebih baik lagi, diantaranya adalah :

- a. Penelitian yang dilakukan M. Aries Djaenuri (2002) yang meneliti tentang Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Rambai Kecamatan Tambun Kabupaten Malang. Penelitian ini memaparkan bahwa pembangunan desa terdiri dari dua unsur utama yaitu partisipasi atau swadaya masyarakat dan pembinaan pemerintah atau dengan kata lain ada dua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan desa yaitu masyarakat dan pemerintah. Dan disamping itu berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa aspek

kepemimpinan Kepala Desa merupakan salah satu aspek yang menonjol dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa.

- b. Penelitian oleh Dian Oktafani(2008) yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini ialah bagaimana gambaran gaya kepemimpinan Kepala Desa, bagaimana peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan Kepala Desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa Galang Suka Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak terlepas dari adanya peran penting dari Kepemimpinan Kepala desa yang berperan sebagai motor penggerak dan pembujuk keikutsertaan masyarakat. Peran aktif seorang Kepala Desa sangat diperlukan agar pembangunan yang ada dalam suatu desa dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.
- c. Leni Lusiana (2009) dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap pembangunan Di Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur yang mengemukakan bahwa Keberhasilan sebuah proses pembangunan pada umumnya sangat bergantung pada pemahaman tugas dan fungsi seorang pemimpin. Untuk itu diperlukan sekali pemimpin yang betul-betul

memahami tugas dan fungsinya sehingga ia mampu mengarahkan dan membawa masyarakatnya kearah yang lebih maju dan sejahtera.

- d. Melisa Fitra (2004) dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan oleh Kepala Desa terhadap Pembangunan Fisik di Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat mengemukakan hasil penelitiannya bahwa Berhasilnya pembangunan desa tidak terlepas dari adanya berbagai macam faktor pendukungnya. Macam-macam faktor pendukung tersebut antara lain adalah Kepemimpinan Kepala Desa. Kendatipun masih banyak faktor-faktor lain di luar faktor tersebut yang juga ikut berpengaruh, seperti Dana Inpres Bantuan Pembangunan Desa, pembinaan dan dukungan dari Pemerintah tingkat atasnya, macam-macam program baik yang berasal dari instansi vertikal departemen maupun non departemen, dan atau yang berasal dari instansi otonom lainnya yang ada, namun apabila tidak didukung oleh Kepemimpinan yang baik dari Kepala Desanya maka pembangunan desa tersebut akan sulit untuk diwujudkan.

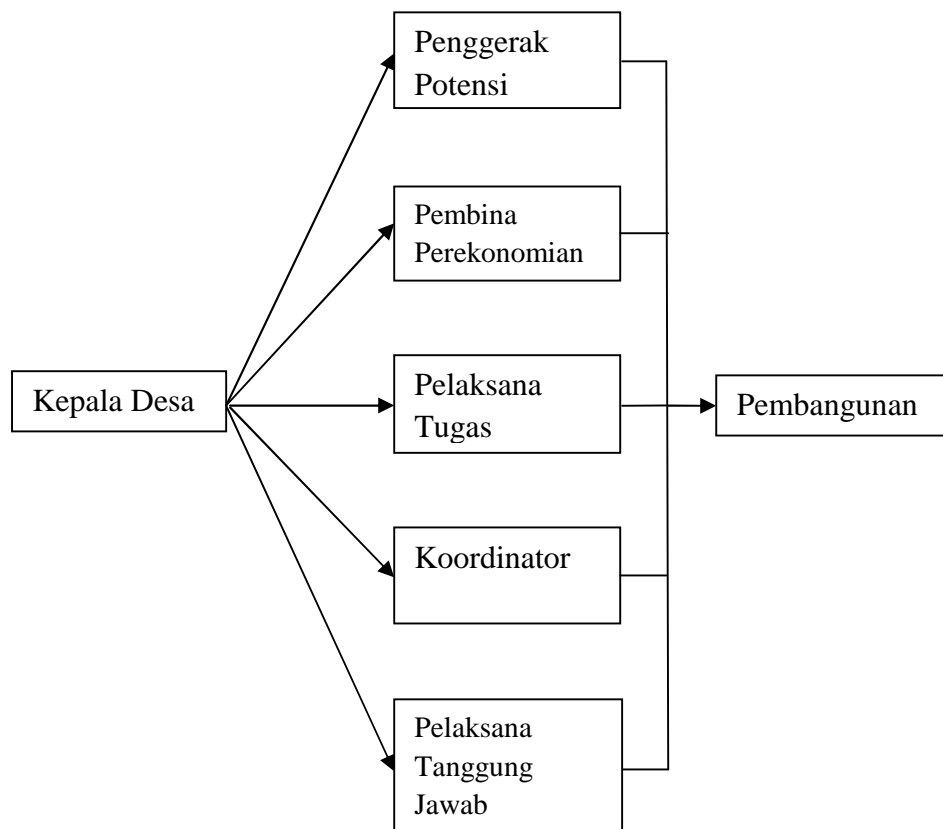
## **2.9. Kerangka Pemikiran**

Kepala desa yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pemimpin formal memiliki peranan yang strategis dalam membawa masyarakat ke arah tujuan pembangunan desa yang dicita-citakan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 14 yakni kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan,

dan kemasyarakatan. Kepala desa juga merangkap sebagai pengusaha tunggal di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk lebih ringkas pembahasan penelitian ini dapat dilihat pada bagan kerangka pemikiran pada gambar II.1

**Gambar II.1. Kepemimpinan Kepala Desa**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, dimana yang menjadi dasar pertimbangan untuk dijadikan objek penelitian adalah penulis ingin meneliti mengenai fungsi kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan di desa Kuala Enok tersebut.

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terbagi atas:

- a. Data Primer yaitu data atau keterangan yang didapat langsung dari seluruh responden melalui wawancara dan pedoman kuisier yang telah disiapkan terlebih dahulu, melalui penelitian responden terhadap indikator kepemimpinan Kepala Desa dalam proses pembangunan fisik di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kantor Camat dan kantor Kepala Desa Kuala Enok yang merupakan data yang sudah diolah, seperti gambaran umum daerah penelitian, tingkat pendidikan penduduk, agama, jenis kelamin penduduk desa dan jenis mata pencaharian penduduk desa.



### **3.3. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, (Sugiono, 2005:90).

Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.

Adapun yang menjadi populasi dan dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa Kuala Enok dan RT, RW yang terdiri dari:

1. Kepala Desa dalam penelitian ini adalah sebagai key informan
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Seksi
4. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
5. RT dan RW dalam penelitian diambil sebagai wakil masyarakat
6. Tokoh Masyarakat dalam penelitian ini juga diambil sebagai wakil masyarakat

Mengingat populasi dalam penelitian ini sangat sedikit, maka dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode sensus dimana keseluruhan populasi diambil menjadi responden dalam penelitian ini, (Suharsimi Arikunto, 2002:108).

Berikut adalah tabel dari jumlah Populasi dan Sampel yang akan menjadi subjek dari penelitian ini, yaitu mengenai Kepemimpinan Kepala Desa dalam

pembangunan didesa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir ialah sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Jumlah Populasi dan Sampel penelitian di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Sub. Populasi	Populasi	Responden	%
1	Sekretaris Desa	1	1	100%
2	Kepala Seksi	3	3	100%
3	Anggota BPD	9	9	100%
4	RT	18	18	100%
5	RW	6	6	100%
6	Tokoh Masyarakat	12	12	100%
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>	<b>51</b>	<b>100%</b>

**Sumber Data:** *Kantor Kepala Desa Kuala Enok 2012*

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- b. Kuisioner, yaitu memberikan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden yang diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasi sehubungan masalah penelitian.

- c. Wawancara, yaitu penulis secara langsung bertanya jawab dengan responden meliputi Kepala Desa, Aparatur Desa Kuala Enok, Anggota BPD, RT dan RW.

**Tabel 3.2 Jumlah populasi dan sampel yang akan menjadi subjek Penelitian**

<b>Teknik Pengumpulan Data</b>	<b>Subjek</b>	<b>Jumlah</b>
Angket	Sekdes, Aparatur Desa, Kepala Urusan, Anggota BPD, Kadus, RT, RW dan Tokoh Masyarakat	51
Wawancara	Kepala Desa, Sekdes, Anggota BPD, dan Tokoh Masyarakat (Pemangku Adat, Tokoh Agama, Cendikiawan dan Pengusaha)	15

**Sumber Data : *Data Olahan Tahun 2013***

### **3.5. Teknik Analisa Data**

Dalam menganalisa data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, data tersebut penulis kelompokkan menurut jenisnya masing-masing kemudian diolah dengan menggunakan metode deskriptif Kualitatif yaitu membahas data yang telah terkumpul dari hasil observasi lapangan, kemudian dilanjutkan pembagian angket, dan wawancara dengan para sampel dalam penelitian ini setelah itu dihubungkan dengan keadaan sebenarnya serta dikaitkan dengan teori-teori yang ada.

### 3.6. Teknik Pengukuran

Untuk memperoleh hasil analisa terhadap indikator yang ada, maka terlebih dahulu akan ditentukan ukuran dari variabel, yaitu:

- a. Mampu, apabila Kepala Desa telah melaksanakan 4 sampai 5 fungsi dari kepemimpinan Kepala Desa dalam proses pembangunan fisik di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir atau 60% sampai 100%.
- b. Cukup Mampu, apabila Kepala Desa dalam proses pembangunan hanya menjalankan 2 atau 3 dari fungsi dalam proses pembangunan fisik di Desa Kuala Enok atau sebesar 16% sampai 54%.
- c. Kurang Mampu, apabila Kepala Desa hanya menjalankan 1 atau tidak melaksanakan sama sekali fungsi kepemimpinan Kepala Desa dalam proses pembangunan fisik di Desa Kuala Enok tersebut, atau sebesar 16% kebawah.

Jadi penilaian pengukuran yang dipakai atas indikator yang ada adalah "Mampu", "Cukup Mampu", dan "Kurang Mampu", dan untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi penggerak potensi, maksudnya Kepala Desa mampu menjadi penggerak segala sumber daya, baik berupa sumber daya manusia ataupun sumber daya alam yang ada didesa agar mampu diberdayagunakan sehingga mampu mendorong terjadinya proses pembangunan didesa.

Mampu : Jika Kepala Desa mampu menggerakkan potensi potensi yang ada didesa yang mencakup sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat menjadi penggerak bagi pembangunan desa.

Cukup Mampu : Jika Kepala Desa kurang mampu menggerakkan potensi potensi yang ada didesa yang mencakup sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat menjadi penggerak bagi pembangunan desa.

Kurang Mampu : Jika Kepala Desa tidak mengetahui sama sekali cara menggerakkan potensi potensi yang ada didesa yang mencakup sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat menjadi penggerak bagi pembangunan desa.

- b. Membina perekonomian desa, maksudnya ialah dalam menjalankan kepemimpinannya, Kepala Desa tidak hanya berperan sebagai pemimpin eksekutif yang hanya mengurus bidang administratif saja, tetapi juga mampu membina, meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga menyelesaikan permasalahan yang sering ada dalam perekonomian masyarakat desa melalui dialog antar masyarakat agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Mampu : Jika Kepala Desa mampu membina,

menyelesaikan permasalahan yang sering ada dalam perekonomian warga dan juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Cukup Mampu : Jika Kepala Desa kurang mampu membina, kurang mampu menyelesaikan permasalahan yang sering ada dalam perekonomian warga dan juga kurang mampu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa sehingga pembangunan tidak dapat terlaksana dengan baik.

Kurang Mampu : Jika Kepala Desa tidak mengetahui sama sekali secara keseluruhan tentang bagaimana cara membina, menyelesaikan permasalahan yang sering ada dalam perekonomian warga dan juga tidak mengetahui sama sekali bagaimana cara meningkatkan perekonomian masyarakat desa sehingga pembangunan tidak dapat terlaksana dengan baik.

- c. Mampu melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya, maksudnya adalah melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan yang ada di atasnya Kepala Desa dapat/mampu mengerjakan tugas yang menjadi hak dan kewajibannya baik itu berupa pelaksanaan peraturan maupun kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Mampu : Jika Kepala Desa mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi perintah kebijakan pemerintahan di atasnya, baik berupa pelaksanaan peraturan maupun pelaksanaan pembangunan .

Cukup Mampu : Jika Kepala Desa kurang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi perintah kebijakan pemerintahan di atasnya, baik berupa pelaksanaan peraturan maupun pelaksanaan pembangunan

Kurang Mampu : Jika Kepala Desa tidak mampu sama sekali melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi perintah kebijakan pemerintahan di atasnya, baik berupa pelaksanaan peraturan maupun pelaksanaan pembangunan.

- d. Mampu melakukan koordinasi, maksudnya adalah usaha-usaha Kepala Desa dalam menyatukan dan mengarahkan berbagai kegiatan pelaksanaan pembangunan didesa.

Mampu : Jika Kepala Desa mampu melakukan kerja sama dengan BPD dan pegawai Aparatur Desa, meletakkan pegawai sesuai dengan bidang dan kemampuan pegawai tersebut, pengendalian terhadap anggota atau bawahan agar tidak bekerja sendiri-sendiri.

Cukup Mampu : Jika Kepala Desa kurang mampu melakukan kerja sama dengan BPD dan pegawai Aparatur Desa, kurang mampu meletakkan pegawai sesuai dengan bidang dan kemampuan pegawai tersebut, kurang mampu mengendalikan anggota atau bawahan agar tidak bekerja sendiri-sendiri.

Kurang Mampu : Jika Kepala Desa sama sekali tidak mampu melakukan kerja sama dengan BPD dan pegawai Aparatur Desa, tidak mampu meletakkan pegawai sesuai dengan bidang dan kemampuan pegawai tersebut, tidak mampu mengendalikan anggota atau bawahan agar tidak bekerja sendiri.



- e. Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya, maksudnya adalah Kepala Desa mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan kewajibannya dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta menarik partisipasi masyarakat untuk bersama-sama untuk memelihara hasil pembangunan.

Mampu : Jika Kepala Desa mampu memberikan informasi dan meyakinkan masyarakat tentang pembangunan di desa, mampu menjalin hubungan silahturrahi dengan masyarakat, dan mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Cukup Mampu : Jika Kepala Desa kurang mampu memberikan informasi dan kurang bisa meyakinkan masyarakat tentang pembangunan di desa, kurang mampu menjalin hubungan silahturrahi dengan masyarakat, dan kurang mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Kurang Mampu : Jika Kepala Desa tidak mampu memberikan informasi dan meyakinkan masyarakat tentang pembangunan di desa, tidak mampu menjalin hubungan silahturrahi dengan masyarakat.

## **BAB IV**

### **KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1. Keadaan Geografis Desa**

Desa Kuala Enok terletak sekitar 53 km dari kota Tembilahan dan merupakan salah satu desa yang terdapat dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir yang tercangkup dalam Kecamatan Tanah Merah. Luas Desa Kuala Enok kurang lebih 8.000 Ha yang terdiri dari 3.500 Ha berupa pemukiman penduduk, Hutan Ulayat 4.000 Ha, dan tanah Kas Desa 500 Ha. Adapun batas-batas wilayah desa Kuala Enok sekarang adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pengalihan.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Teluk Medan
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sungai Rukam
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Enok Dalam

Secara topografi, tinggi pusat pemerintah wilayah desa Kuala Enok dari permukaan laut adalah 1- 4 meter. Terdapat banyaknya tumbuh-tumbuhan di tepi-tepi sungai dan muara parit-parit seperti pohan nipah. Wilayah Kecamatan Tanah Merah merupakan daerah berhutan rawa-rawa dan beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Kedua musim ini sangat dominan pengaruhnya kepada kehidupan masyarakat. Pada musim kemarau panjang kegiatan para petani agak menurun, disamping timbulnya beberapa penyakit, sedangkan pada musim

penghujan selain menyuburkan tanah pertanian juga air hujan merupakan kebutuhan pokok masyarakat sebagai sumber air bersih.

Keadaan Tanahnya berupa rawa-rawa bergelombang dengan gambut yang cukup tebal yang sebagian besar dimanfaatkan masyarakat desa untuk berkebun, bertani dan beternak. Sepanjang desa ini dialiri sungai Indragiri yang cukup panjang dan menjadi jalur pelayaran bagi kapal-kapal dari luar yang bertujuan singgah di PT. Pulau Sambu, sekaligus merupakan sarana lalu lintas utama bagi penduduk. Transportasi yang dominan adalah transportasi air, yaitu melalui sungai-sungai dan parit-parit sebagai penghubung antar desa, antar kecamatan dan Ibukota Kabupaten serta mempunyai nilai ekonomis penting dalam roda perekonomian maupun pemerintahan.

Sebagian daratan dipergunakan untuk pemukiman warga desa dengan rata-rata model rumah panggung atau rumah bertiang. Model rumah seperti ini mengingat desa ini terletak dipinggiran sungai dan tempat bertemunya aliran sungai dengan laut atau yang disebut muara/kuala sehingga rutin digenangi air laut jika terjadi pasang laut yang cukup besar. Keadaan alam sebagian besar terdiri atas tanah gambut dan tanah endapan sungai yang dialiri oleh sungai-sungai dan parit-parit yang sekaligus merupakan sarana lalu lintas utama bagi penduduk.

Transportasi yang dominan adalah transportasi air, yaitu melalui sungai-sungai dan parit-parit sebagai penghubung antar desa, antar kecamatan dan Ibukota

Kabupaten serta mempunyai nilai ekonomis penting dalam roda perekonomian maupun pemerintahan.

#### 4.2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk desa Kuala Enok seluruhnya adalah 6.115 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2011 dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 476 KK. Jumlah orang dewasa dari jumlah tersebut 3.344 orang adalah lelaki dan 2.771 orang adalah perempuan, sisanya adalah remaja dan anak-anak. Data tersebut peneliti dapatkan dari tabel Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin penduduk dalam kecamatan Tanah Merah berdasarkan sensus penduduk tahun 2011 di Kantor Kecamatan Tanah Merah.

**Tabel 4.1. Jumlah Penduduk dan *Sex Ratio* Penduduk dalam Kecamatan Tanah Merah Tahun 2011**

No	Desa/ Kelurahan	Banyaknya Penduduk (jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sungai Nyiur	806	665	1.471	121
2	Selat Nama	213	181	394	118
3	Kuala Enok	3.344	2.771	6.115	121
4	Sungai Laut	1.455	1.297	2.752	112
5	Tanjung Pasir	1.771	1.671	3.442	106
6	Tanah Merah	7.614	7.384	14.998	103
7	Tanjung Baru	1.181	1.060	2.241	111
8	Tekulai Hulu	336	330	666	102
9	Tekulai Hilir	622	669	1.291	93
10	Tekulai Bugis	324	319	643	101

<b>JUMLAH</b>	<b>17.666</b>	<b>16.347</b>	<b>34.013</b>	<b>1.088</b>
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

**Sumber Data : Kecamatan Tanah Merah Dalam Angka Tahun 2011**

#### **4.3. Pendidikan**

Berdasarkan pembagian usia kelompok pendidikan, jumlah penduduk desa Kuala Enok atau yang bersekolah atau sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2. Jumlah kelompok umur yang telah menyelesaikan pendidikan di  
Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah**

<b>No</b>	<b>Kelompok Umur</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	12 Tahun Keatas	SD	285	17 %
2	15 Tahun Keatas	SLTP	349	22%
3	18 Tahun Keatas	SMA	458	50%
4	25 Tahun Keatas	PERGURUAN TINGGI	135	11%
	<b>Total</b>		<b>1.227</b>	<b>100%</b>

**Sumber Data : Kantor Desa Kuala Enok**

Tabel diatas menunjukkan bahwa 17% berpendidikan SD, 22% berpendidikan SLTP dan SMA dan 11% Perguruan Tinggi. Dari presentase diatas dapat disimpulkan mayoritas rata-rata penduduk Desa Kuala Enok adalah berasal dari jenjang pendidikan SLTP dan SMA.

#### 4.4. Angkatan Kerja dan Jenis Pekerjaan

Pembagian penduduk desa Kuala Enok berdasarkan pembagian usia kelompok tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 4.3. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Usia di Desa kuala Enok**

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase
1	16-20	67	8 %
2	21-25	183	22 %
3	26-30	191	23 %
4	31-35	163	20 %
5	36-40	139	17 %
6	>40	85	10 %
	<b>Total</b>	<b>827</b>	<b>100 %</b>

**Sumber Data : Kantor Kepala Desa Kuala Enok**

Tabel diatas menunjukkan bahwa kelompok terbesar tenaga kerja berada pada usia 21-40 tahun yaitu berada pada kisaran 82%, sisanya 8% berusia dibawah 20 tahun 10% berusia diatas 40 tahun. Besarnya jumlah tenaga kerja ikut menentukan keberhasilan pembangunan desa.

Dan jika dikaitkan dengan tabel IV.3 dari jumlah tenaga kerja yang ada diantara 317 orang berpendidikan formal, sisanya 510 orang tidak tamat SD atau tidak berpendidikan. Mereka yang berpendidikan umumnya mampu bersainng mendapatkan pekerjaan dan berpenghasilan tetap sehingga tingkat ekonomi mereka

akan lebih baik dari mereka yang tidak berpendidikan karena sulit bersaing dan berproduksi tidak pasti.

Pembagian penduduk Desa Kuala Enok berdasarkan pengelompokan mata pencarian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4. Jumlah penduduk berdasarkan pembagian kelompok mata pencaharian dan profesi di desa Kuala Enok**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Nelayan	211	26%
2	Petani	483	46%
3	Pedagang	60	12%
4	Pegawai Swasta(Karyawan)	48	10%
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	25	6%
	<b>Total</b>	<b>822</b>	<b>100%</b>

**Sumber Data : Kantor Kepala Desa Kuala Enok**

Dari tabel diatas terlihat bahwa 72% penduduk Kuala Enok bermata pencarian sebagai Petani dan Nelayan, wiraswasta/pedagang hanya 12% dan pegawai negeri hanya 6%. Rendahnya pendidikan menyebabkan sebagian besar penduduk menggantungkan nasib pada alam dengan bertani dan menangkap ikan.

#### **4.5. Kesehatan**

Pembangunan pelayanan kesehatan yang berkualitas ditujukan untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup masyarakat, sehingga mencapai kualitas hidup dan sumberdaya manusia yang prima. Penunjang aspek kesehatan masyarakat di Kecamatan Tanah Merah telah memiliki berbagai sarana kesehatan. Pada tahun 2012 terdapat 2 buah puskesmas, 1 buah puskesmas RI, 10 buah puskesmas dan 5 buah puskesmas pembantu, sedangkan jumlah para medis sebanyak 27 orang yang terdiri dari 2 dokter umum, 1 dokter gigi, 5 bidan dan 19 perawat.

#### **4.6. Agama**

Secara demografis, masyarakat desa Kuala Enok adalah masyarakat yang sangat intens dengan nuansa islami, bahkan sampai pada tingkat fanatisme. Islam adalah agama mayoritas masyarakat di desa Kuala Enok, tanpa menafikan keberadaan agama minoritas lainnya. Penduduk desa Kuala Enok mayoritas adalah pemeluk Agama Islam (sekitar 96,11%) sisanya adalah Agama Kristen dan Budha (sekitar 3,89%). Rumah Ibadah di daerah ini terdiri atas masjid dan musholla sebanyak 6 buah dan gereja 1 buah dan Wihara 2 buah.

Untuk menunjang rutinitas peribadatan di Desa Kuala Enok perlu kiranya dibangun tempat ibadah bagi masyarakat yang akan beribadah menurut agama masing-masing. Adapun jumlah sarana ibadah di Desa Kuala Enok dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:



**Tabel 4.5 Jumlah Tempat Ibadah Di Desa Kuala Enok**

No	Agama	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Islam	Masjid	6
		mushalla	2
2	Budha	Wihara	2
3	Kristen	Gereja	1
	<b>Jumlah</b>		<b>11</b>

**Sumber Data:** *Kantor Kepala Desa Kuala Enok*

Tabel diatas menunjukkan bahwa di Desa Kuala Enok terdapat 6 buah Masjid dan 2 buah Mushalla, Wihara/Klenteng sebanyak 2 buah dan Gereja sebanyak 1 buah, umumnya pemeluk agama selain islam adalah penduduk pendatang yang bekerja pada perusahaa-perusahaan yang berada pada desa tersebut.

#### **4.7. Suku/Etnis**

Pada umumnya terdapat beberapa suku di Desa Kuala Enok, oleh karena daerahnya yang merupakan daerah pesisir, yang mudah diakses oleh masyarakat suku-suku yang berbeda. Maka sejak masa masa berdirinya Desa Kuala Enok telah banyak didatangi oleh suku-suku lain yang dahulunya ingin mencari tempat bermukim dan mata pencaharian sehingga menjadikan Desa Kuala Enok sebagai tempat tinggal baru mereka.

Berikut adalah tabel mengenai jumlah pembagian masyarakat desa Kuala Enok berdasarkan suku/etnis mereka, yaitu :

**Tabel 4.6 Tabel Jumlah penduduk berdasarkan Suku/Etnis**

No	Suku/Etnis	Jumlah	Persentase
1	Bugis	2.158	35,29%
2	Banjar	743	12,15%
3	Minang	274	04,48%
4	Jawa	1.122	18,34%
5	Melayu	359	05,87%
6	Duanu (Suku Asli)	1.021	16,69%
7	Tionghoa	266	04,34%
8	Lain-lainnya	217	03,54%
<b>Total</b>		<b>6115</b>	<b>100%</b>

**Sumber Data : Kantor Kepala Desa Kuala Enok**

Tabel diatas menunjukkan bahwa di Desa Kuala Enok terdapat persebaran suku yang beragam, suku mayoritas adalah suku bugis yang mulai berdatangan pada masa awal kemerdekaan dikarenakan ingin mencari kehidupan baru yang lebih layak ditanah yang mereka singgahi dan kemudian bersama suku asli setempat (Duanu) membangun desa Kuala Enok. Tidak lama setelah berdirinya berbagai pabrik pengolahan Kelapa didesa tersebut berdatangan pula suku-suku lain yang mayoritas ingin bekerja dipabrik-pabrik yang ada dan membuka perkebunan baru.

Sebagian besar dari suku-suku yang ada di Desa Kuala Enok bermata pencarian sebagai petani perkebunan Kepala yang memang tepat ditanam didaerah tersebut dikarenakan letaknya yang berada ditepi laut atau pesisir. Sehingga untuk

menanam tanaman lain agak susah dikarenakan sering terjadi banjir rob atau banjir air pasang yang menyebabkan tanaman lain tidak cocok untuk ditanam di daerah tersebut.

#### **4.8. Pemerintahan Desa**

Pemerintah Desa Kuala Enok dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dalam menjalankan tugas-tugas administrasi pemerintahan, Kepala Desa dibantu oleh aparatur atau perangkat desa. Dan dalam melayani masyarakat, Kepala Desa menjalin kerjasama dengan Kepala Dusun dan Kepala RT/RW sebagai perangkat yang menjembatani masyarakat dan memperoleh pelayanan yang berkenaan dengan bidang pelayanan publik. Adapun keadaan jumlah aparatur pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.7 Tabel jumlah aparatur pemerintahan Desa Kuala Enok**

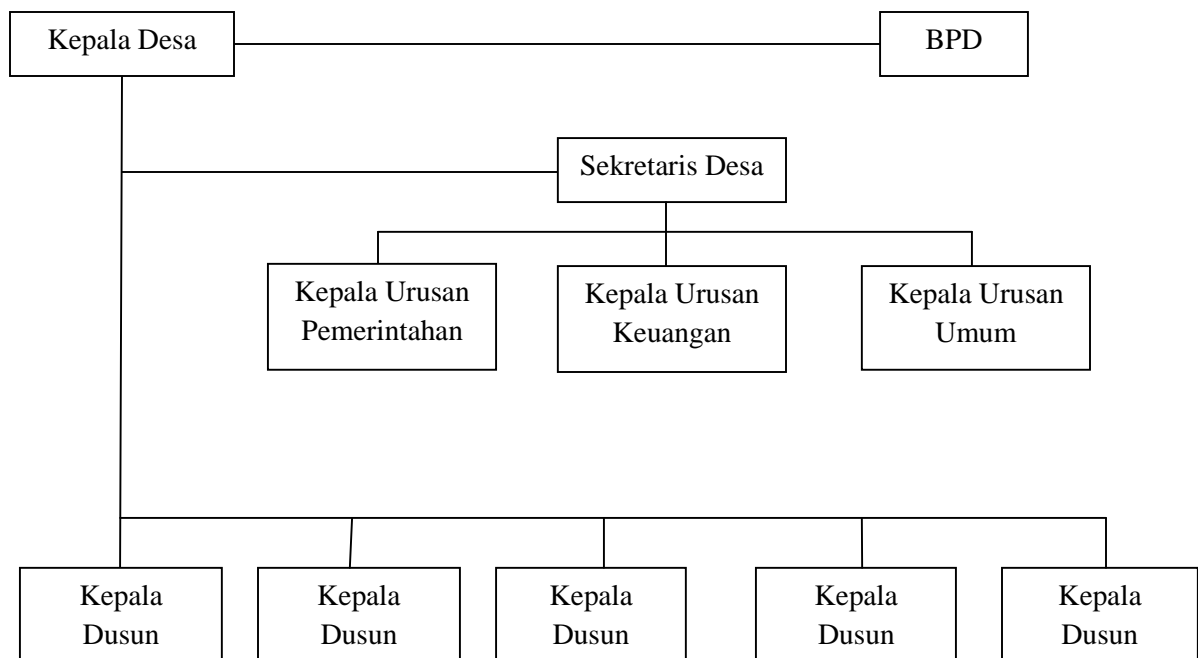
<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kepala Urusan	3
4	Anggota BPD	9
5	Staf	3
6	Kepala Dusun	5

7	Ketua RW	6
8	Ketua RT	18
Total		38

**Sumber Data:** *Kantor Kepala Desa Kuala Enok*

Dan Adapun Struktur Pemerintahan Desa Kuala Enok sebagaimana terlihat pada Tabel diatas dapat diuraikan sebagaimana skema berikut:

**Bagan I : Stuktur Organisasi dan Tata Kerja pemerintahan Desa Kuala Enok  
Kecamatan Tanah Merah**



Berdasarkan bagan diatas, dapat di jelaskan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi dalam struktur organisasi dalam pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

## 1. Kepala Desa

- a. Kedudukan: Sebagai alat pemerintah dan pelaksana pemerintah
- b. Tugas: Penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri, urusan pemerintah, dan pembinaan masyarakat. Menumbuh kembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.
- c. Fungsi: Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga, koordinasi, menggerakkan peran masyarakat dalam pembangunan, melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.

## 2. Sekretaris Desa

- a. Kedudukan: Sebagai staf dibidang tata usaha kepala desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.
- b. Tugas: Menyelenggarakan pembinaan dan administrasi pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, serta pelaksana pelayanan ketata usahaan desa.
- c. Fungsi: Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, melaksanakan urusan keuangan dan urusan administrasi umum serta melaksanakan tugas kepala desa dalam hal bila kepala desa berhalangan.

### 3. Kepala urusan

- a. Kedudukan: Sebagai tugas pembantu bidang tugasnya masing-masing.
- b. Tugas: Melaksanakan kegiatan ketata usahaan dalam bidang tugasnya masing-masing.
- c. Fungsi: Melaksanakan pencatatan, pengumpulan, dan pengolahan data dan informasi yang menyangkut bidang tugasnya masing-masing.

### 4. Kepala Dusun

- a. Kedudukan: Sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya.
- b. Tugas: Melaksanakan pemerintahan desa dibawah kepemimpinan kepala desa wilayah kerjanya.
- c. Fungsi: Melaksanakan kegiatan pemerintah, dan pembangunan kemasyarakatan diwilayah kerjanya serta melaksanakan keputusan desa dan kebijakan kepala desa.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini penulis akan menemukakan data penelitian yang merupakan hasil yang penulis dapatkan dilokasi penelitian, yaitu di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya menjelaskan peran kepemimpinan Kepala Desa didalam pelaksanaan pembangunan.

Data yang penulis sajikan dalam penulisan ini adalah data yang penulis peroleh dari hasil quisioner yang diisi oleh seluruh aparatur pemerintahan dan tokoh masyarakat yang menjadi sampel dalam penelitian di desa Kuala Enok, sebagai responden dan mengadakan pengamatan langsung pada lokasi penelitian guna memperoleh data secara langsung yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Pada bab ini penulis menguraikan pembahasan secara teoritis maupun penelitian secara langsung pada objek penelitian. Adapun analisa dalam pembahasan skripsi ini, penulis lakukan sesuai kemampuan yang penulis miliki.

#### **5.1. Identitas Responden**

Identitas responden perlu dikemukakan pada penelitian ini agar data yang diperoleh betul-betul dapat dipercaya dan dipertanggung-jawabkan. Adapun identitas yang akan diuraikan adalah tingkat pendidikan, golongan umur atau usia dan jenis kelamin.

### 5.1.1 Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang digolongkan dalam tingkat pendidikan yang akan dipaparkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 5.1: Tingkat Pendidikan Responden**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD-SMP	24	47,05%
2	SMA	15	29,41%
3	Diploma	1	01,96%
4	S1	9	17,64%
6	S2	2	03,92%
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan tahun 2013**

Dari tabel 5.1 mengenai tingkat pendidikan diatas dapat dilihat bahwa responden yang berpendidikan SD-SMP sebanyak 24 orang (47,05%), yang berpendidikan SMA sebanyak 15 orang (29,41%), yang berpendidikan Diploma sebanyak 1 orang (01,96%), yang berpendidikan S1 sebanyak 9 orang (17,64%) sedangkan yang berpendidikan S2 sebanyak 2 orang (03,92%).



### 5.1.2 Menurut Tingkat Usia/Umur

Umur merupakan salah satu faktor yang bersangkutan dengan tingkat kejelasan data yang akan diperoleh sesuai dengan kondisi yang terjadi, karena dengan tingkat umur yang sesuai dengan kondisi yang terjadi, karena dengan tingkat umur yang sesuai dengan kebutuhan peneliti akan data yang ingin diperoleh. Nantinya akan mempermudah peneliti dalam menganalisa data yang diperoleh baik dari wawancara maupun kuisisioner yang diajukan peneliti kepada responden terkait penelitian yang sedang dilakukan.

Dibawah ini dipaparkan tinngkat usia responden yang dijadikan responden peneliti sebagai berikut:

**Tabel 5.2: Usia/Umur responden**

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1.	20-30 Tahun	10	19,60%
2.	31-40 Tahun	14	27,45%
3.	41-50 Tahun	22	43,13%
4.	51-60 Tahun	5	09,80%
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan Tahun 2013**

Dari tabel 5.2 mengenai umur atau usia responden diatas dapat dilihat bahwa responden yang berusia antara 20-30 tahun sebanyak 10 orang (19,60%), yang berusia antara 31-40 tahun sebanyak 14 orang (27,45%), yang berusia antara 41-50 sebanyak 22 orang (43,13%), sedangkan yang berusia antara 51-60 tahun keatas sebanyak (09,80%).

### 5.1.3 Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin responden pada penelitian di Desa Kuala Enok ini dapat diketahui pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.3 : Jenis Kelamin Responden**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	43	84,31%
2	Perempuan	8	15,68%
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan Tahun 2013**

Dari tabel 5.3 diatas dapat dilihat bahwa jenis kelamin responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 43 orang atau (84,31%) dan selebihnya responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 8 orang atau (15,68%) dari jumlah total responden.

## **5.2 Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa**

Keberhasilan suatu desa dalam pembangunan bukan semata-mata datang dengan sendirinya, dan hal ini tidak terlepas dari peran kepemimpinan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat membawa desa tersebut kepada tujuan yang baik. Kepala Desa sebagai kordinator serta sebagai pucuk pimpinan tertinggi pada organisasi desa harus bisa menjalin kerjasama harmonis, baik itu dengan bawahannya yaitu aparatur pemerintahan desa dan juga harus mampu menjalin kerjasama yang baik dengan pihak lain yang mempunyai andil cukup besar terhadap pembangunan desa.

Setelah mendistribusikan angket (kuisisioner) kepada responden penelitian yang terdiri dari sampel yang menjadi subjek penelitian, kemudian penulis mengolah data yang ada selanjutnya penulis akan menjelaskan hasilnya secara berurutan perindikator yaitu sebagai berikut:

### **5.2.1 Kepala Desa Sebagai Penggerak Potensi masyarakat**

Kepala Desa merupakan pemimpin terdepan dalam menggerakkan dan mengarahkan potensi masyarakat desa agar potensi yang ada baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) dapat tergali, berkembang dan tumbuh dengan baik, jika hal ini dapat dilaksanakan bukan tidak mungkin akan mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa yang juga ikut berpengaruh terhadap terciptanya pembangunan di desa Kuala Enok.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan didesa Kuala Enok, baik itu melalui wawancara maupun melalui daftar pertanyaan yang disebarkan kepada sampel penelitian, diketahui bahwa Kepala Desa kurang mampu dalam membimbing, menggerakkan dan mengarahkan potensi-potensi yang ada dimasyarakat sehingga potensi yang ada di desa Kuala Enok kurang mampu tergarap dengan maksimal. Hal ini penulis simpulkan disebabkan karena Kepala Desa tidak mampu menjalin komunikasi yang baik kepada masyarakat. Kepala Desa hanya memberikan wacana saja, tapi tidak dalam pelaksanaan realisasi seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

Berikut ini penulis akan menguraikan tanggapan responden terhadap kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan, khususnya dalam menggerakkan potensi yang ada pada masyarakat Desa Kuala Enok dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.4 :   Tanggapan Responden Desa Kuala Enok mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Menggerakkan Potensi Masyarakat Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir**

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase (%)</b>
1.	Mampu	13	25,49%
2.	Cukup Mampu	18	35,29%
3.	Kurang Mampu	20	39,21%
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Tahun 2013**

Dari tabel 5.4 dapat diketahui tanggapan responden terhadap kemampuan Kepala Desa dalam menggerakkan potensi yang ada dimasyarakat dalam mewujudkan pembangunan, 13 responden (25,49%) menyatakan mampu, hal ini memberikan pengertian bahwa Kepala Desa telah dapat mengarahkan, dan membimbing masyarakat, sehingga masyarakat menjadi mampu untuk menggerakkan potensi-potensi yang ada dalam menciptakan pembangunan di desa. Kemudian 18 responden (35,29%) menyatakan cukup mampu, hal ini membuktikan bahwa Kepala Desa sudah memberikan petunjuk kepada masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang ada, namun masyarakat belum sepenuhnya mengerti bagaimana cara memanfaatkannya dengan baik sesuai apa yang menjadi arahan atau petunjuk Kepala Desa. Selanjutnya 20 responden (39,21%) menyatakan kurang mampu, hal ini membuktikan bahwa Kepala Desa kurang memberikan arahan atau petunjuk kepada masyarakat bagaimana cara memanfaatkan dan menggerakkan potensi yang ada pada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami bagaimana cara memanfaatkan dan menggerakkan potensi yang ada di desa Kuala Enok.

Dari hasil tanggapan responden pada tabel 5.4 penulis dapat menganalisis sikap Kepala Desa dalam memberikan arahan atau petunjuk kepada masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada tidak dapat sepenuhnya mampu dipahami oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena cara penyampaian kepada masyarakat yang kurang optimal. Sehingga pemanfaatan potensi sumber daya yang ada pada

masyarakat Desa Kuala Enok tidak terkelola dengan optimal sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat.

**Tabel 5.5 : Tanggapan Responden Desa Kuala Enok Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Menciptakan Inovasi, Maupun Gagasan Baru Pengelolaan Potensi Desa**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Mampu	11	21,56%
2.	Cukup Mampu	16	31,37%
3.	Kurang Mampu	24	47,05%
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Tahun 2013**

Dari tabel 5.5 dapat diketahui tanggapan sikap Kepala Desa dalam menciptakan Inovasi maupun gagasan baru dalam pengelolaan potensi desa Kuala Enok termasuk pada kategori “ Kurang Mampu “ yaitu sebanyak 24 responden atau 47,05% dan tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” sebanyak 16 responden atau 31,37% sedangkan alternatif jawaban pada kategori “Mampu” sebanyak 11 reponden atau 21,56% dari keseluruhan jumlah responden penelitian.

Adapun tanggapan responden pada kategori “Kurang Mampu” lebih banyak, dapat penulis analisis dari jawaban responden, maupun pengamatan langsung dilapangan penulis dapatkan kesimpulan bahwa kemampuan Kepala Desa dalam menciptakan inovasi maupun gagasan baru terkait pengelolaan potensi atau sumber

daya yang ada di desa masih belum dapat sepenuhnya memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kepala Desa juga dinilai belum mampu menciptakan solusi yang tepat bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di desa agar mampu dimanfaatkan sebaik mungkin.

**Tabel 5.6: Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Merealisasikan Program Terkait Pengembangan Potensi Desa Baik SDM atau SDA**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Mampu	13	25,49%
2.	Cukup Mampu	16	31,37%
3.	Kurang Mampu	22	43,13%
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Tahun 2013**

Dari tabel 5.6 dapat diketahui tanggapan sikap Kepala Desa dalam menciptakan Inovasi maupun gagasan baru dalam pengelolaan potensi desa Kuala Enok termasuk pada kategori “ Kurang Mampu “ yaitu sebanyak 22 responden atau 43,13% dan tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” sebanyak 16 responden atau 31,37% sedangkan alternatif jawaban pada kategori “Mampu” sebanyak 13 responden atau 25,49% dari keseluruhan jumlah responden penelitian.

Dari hasil tanggapan pada tabel 5.6 penulis dapat menganalisis bahwa tanggapan responden terhadap kemampuan Kepala Desa dalam merealisasikan

Program Terkait Pengembangan potensi, baik bidang sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) agar dapat memacu pembangunan dinilai masih kurang. Hal ini membuktikan bahwa Kepala Desa masih kurang mampu merealisasikan program atau kebijakannya terkait pengembangan potensi yang ada didesa yang mengakibatkan juga berkurangnya partisipasi masyarakat dan pembangunan didesa pun tidak berjalan seperti apa yang menjadi harapan masyarakat.

**Tabel 5.7 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kepala Desa Sebagai Penggerak Potensi Masyarakat**

No	Kategori			Jumlah
	Mampu	Cukup Mampu	Kurang Mampu	
1	13 (25,49%)	18 (35,29%)	20 (39,21%)	51
2	11 (21,56%)	16 (31,37%)	24 (47,05%)	51
3	13 (25,49%)	16 (31,37%)	22 (43,13%)	51
<b>Rata-Rata</b>	<b>12 (23,52)</b>	<b>17 (33,33)</b>	<b>22 (43,13)</b>	<b>51 (100%)</b>

**Sumber : Data Olahan Tahun 2013**

Dari hasil tanggapan responden yang direkapitulasi tentang variable penelitian Kepala Desa sebagai penggerak potensi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Desa Kuala Enok Kec. Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, ternyata hasil penelitian dapat diketahui : tanggapan responden pada kategori “Kurang Mampu“ ada 22 responden atau 43,13% dan tanggapan responden pada



kategori “Cukup Mampu” ada 17 responden atau 33,33% serta tanggapan responden pada kategori “Mampu” ada 12 responden atau 23,52% dari keseluruhan jumlah responden.

Dari hasil penelitian tersebut ternyata fungsi Kepala Desa sebagai penggerak Potensi Masyarakat di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir termasuk pada kategori “Kurang Mampu” yaitu ada 22 orang responden atau 43,13% yang memberikan tanggapannya dari 51 orang jumlah responden masyarakat secara keseluruhan.

### **5.2.2 Kepala Desa Sebagai Pembina Perekonomian Masyarakat**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Desa tidak hanya berperan sebagai pemimpin eksekutif saja, tetapi Kepala Desa juga dituntut agar mampu mengarahkan, membina dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dan juga mampu menyelesaikan permasalahan yang sering ada dalam perekonomian masyarakat desa melalui dialog antar masyarakat agar pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik.

Kepala Desa harus mampu merangkum saran, ide-ide dan tanggapan masyarakat, sehingga dapat menciptakan solusi yang tepat bagi program-program perekonomian kepada masyarakat, agar rumusan programnya tersebut tepat dan mengena sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat desa. Disamping itu Kepala Desa juga harus mampu mengajak pihak-pihak luar agar mau bekerja sama

menggerakkan, menanamkan modal usaha di desa sehingga masyarakat dapat ikut menikmati hasil dari usaha yang telah dilakukan oleh Kepala Desa.

**Tabel 5.8      Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Kepala Desa  
Dalam Membina dan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat  
Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mampu	10	19,60%
2.	Cukup Mampu	17	33,33%
3.	Kurang Mampu	24	47,05%
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan Tahun 2013**

Dari tabel 5.8 dapat diketahui tanggapan responden terhadap peran Kepala Desa dalam membina, meningkatkan dan memecahkan masalah perekonomian masyarakat. Dimana 10 responden (19,60%) menyatakan mampu, hal ini membuktikan Kepala Desa telah mampu membina perekonomian masyarakat desa sehingga hal ini berpengaruh juga terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat desa Kuala Enok. Kemudian 17 responden (33,33%) menyatakan cukup mampu, hal ini memperlihatkan bahwa Kepala Desa telah mampu membina perekonomian tetapi Kepala Desa belum mampu meningkatkann secara signifikan taraf hidup masyarakat desa. Selanjutnya 24 responden (47,05%) menyatakan kurang mampu hal ini

membuktikan bahwa Kepala Desa kurang mampu membina perekonomian masyarakat desa.

Dari hasil tanggapan responden pada tabel 5.8 penulis dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa peran Kepala Desa dalam membina, menggerakkan dan memecahkan masalah perekonomian masyarakat desa adalah Kurang Mampu, hal ini membuktikan bahwa Kepala Desa belum mampu menciptakan solusi yang tepat bagi pengembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

**Tabel 5.9 : Tanggapan Responden Desa Kuala Enok mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Mengajak Serta Masyarakat, LPM dan BPD Dalam Memecahkan Masalah Perekonomian Masyarakat Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mampu	13	25,49%
2.	Cukup Mampu	15	29,41%
3.	Kurang Mampu	23	45,09%
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan Tahun 2013**

Dari tabel 5.9 dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan Kepala Desa dalam mengajak serta masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan pihak terkait dalam memecahkan masalah perekonomian masyarakat desa Kuala Enok termasuk pada kategori “Kurang

Mampu” sebanyak 23 responden atau 45,09% dan tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” sebanyak 15 responden atau 29,41% sedangkan “Mampu” sebanyak 13 responden atau 25,49% dari keseluruhan jumlah responden.

Melalui hasil tanggapan responden pada tabel 5.9 penulis dapat menganalisis peran Kepala Desa dalam mengajak serta masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dan pihak terkait dalam memecahkan masalah perekonomian masyarakat desa Kuala Enok adalah “Kurang Mampu”. Upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa dirasa masyarakat masih kurang dan tidak adanya perhatian serius Kepala Desa dalam memecahkan perekonomian juga dapat menjelaskan bahwa Kepala Desa tidak mampu menjalin hubungan yang erat dengan pihak-pihak yang ikut berperan serta terhadap pengembangan perekonomian desa. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan bahwa peran Kepala Desa dalam pembangunan dibidang perekonomian masyarakat Desa Kuala Enok belum terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat.

**Tabel 5.10 : Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Menciptakan Program-Program Pembangunan di Bidang Ekonomi untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mampu	10	19,60%
2.	Cukup Mampu	14	27,45%
3.	Kurang Mampu	27	52,94%
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>100%</b>

**Sumber : Data Olahan Tahun 2013**

Dari Tabel 5.10 dapat diketahui tanggapan responden terhadap Kepala Desa dalam menciptakan program-program pembangunan dibidang ekonomi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat desa termasuk pada kategori “Kurang Mampu” sebanyak 27 responden atau sebanyak 52,94% dan tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” sebanyak 14 atau 27,45% sedangkan pada alternatif jawaban “Mampu” sebanyak 10 responden atau 19,60% dari keseluruhan jumlah responden.

Dari hasil tanggapan responden pada tabel 5.10 penulis dapat menganalisis tanggapan responden mengenai kemampuan Kepala Desa dalam menciptakan program-program pembangunan di bidang ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa kuala enok masih kurang, hal ini dapat dibuktikan dengan tanggapan responden dimana 27 responden atau sebanyak 52,94% menyatakan Kurang Mampu, hal ini dikarenakan masyarakat yang menilai peran kepala desa masih dirasa belum mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

**Tabel 5.11 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kepala Desa  
Sebagai Pembina Perekonomian Masyarakat**

No	Kategori			Jumlah
	Mampu	Cukup Mampu	Kurang Mampu	
1	10 (19,60%)	17 (33,33%)	24 (47,05%)	51
2	13 (25,49%)	15 (29,41%)	23 (45,09%)	51
3	10 (19,60%)	14 (27,45%)	27 (52,94%)	51
<b>Rata-Rata</b>	<b>11</b> <b>(21,56%)</b>	<b>15</b> <b>(29,41%)</b>	<b>25</b> <b>(49,01%)</b>	<b>51</b> <b>(100%)</b>

**Sumber : Data Olahan Tahun 2013**

Dari hasil tanggapan responden yang direkapitulasi mengenai variable penelitian Kepala Desa sebagai Pembina Perekonomian masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Desa Kuala Enok Kec. Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, ternyata hasil penelitian dapat diketahui : tanggapan responden pada kategori “Kurang Mampu” ada 25 responden atau 49,01% dan tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” ada 15 responden atau 29,41% serta tanggapan reponden pada kategori “Mampu” ada 11 responden atau 21,56 % dari keseluruhan jumlah responden.

Dari hasil penelitian tersebut ternyata fungsi Kepala Desa sebagai penggerak Potensi Masyarakat di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir termasuk pada kategori “Kurang Mampu” yaitu ada 25 orang

responden atau 49,01% yang memberikan tanggapannya dari 51 orang jumlah responden masyarakat secara keseluruhan.

### **5.2.3 Kepala Desa Sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan Atasannya**

Pelaksana tugas berarti kepanjangan tangan atau orang yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas yang dikeluarkan oleh kebijakan pemerintahan yang ada di atasnya. Kepala Desa merangkap tugas sebagai pemimpin tertinggi juga sebagai perantara bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya, terlepas dari apapun yang menjadi keinginan masyarakat, Kepala Desa harus aktif dalam mendengar keluhan masyarakat dan sebisa mungkin mampu memfasilitasi agar pemerintahan di atasnya dapat turut serta dalam pembangunan di Desa Kuala Enok.

Kepala Desa juga harus mampu menyampaikan dan menjelaskan program-program yang dikeluarkan oleh pemerintahan atasannya dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat terkait pelaksanaan program atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan atasannya. Sehingga pelaksanaan program tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana atau jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya agar masyarakat dapat ikut merasakan langsung manfaat dan kegunaan dari program atau tersebut.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Kuala Enok, baik melalui wawancara maupun melalui daftar pertanyaan yang disebarkan, diketahui bahwa

Kepala Desa kurang baik sebagai pelaksana tugas atasannya dan sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya.

**Tabel 5.12 : Tanggapan Responden mengenai Kemampuan Kepala Desa Sebagai Pengemban Tugas Atasannya Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mampu	13	25,49%
2.	Cukup Mampu	16	31,37%
3.	Kurang Mampu	22	43,13%
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Tahun 2013**

Dari Tabel 5.12 dapat diketahui tanggapan responden terhadap peran Kepala Desa sebagai pengemban tugas atasannya sesuai dengan apa yang diamanatkan, baik itu pelaksanaan kebijakan/peraturan maupun pelaksanaan program-program pembangunan termasuk pada kategori “Kurang Mampu” sebanyak 22 responden atau 43,13% dan tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” sebanyak 16 responden atau 31,37% sedangkan “Mampu” sebanyak 13 orang responden atau 25,49% dari jumlah keseluruhan responden.

Tanggapan responden pada kategori “Kurang Mampu” lebih banyak dikarenakan Kepala Desa kurang mampu menjelaskan tujuan dari Kebijakan peraturan maupun program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan yang lebih tingkatannya, sehingga dalam



penyampiannya tersebut masyarakat tidak mampu memahami benar apa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa dan terkadang malah menimbulkan kesalahpahaman dimasyarakat desa itu sendiri.

**Tabel 5.13 : Tanggapan Responden mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Memenuhi Target dan Jadwal Pencapaian Program Pemerintahan Atasannya Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mampu	12	23,52%
2.	Cukup Mampu	16	31,37%
3.	Kurang Mampu	23	45,09%
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Tahun 2013**

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan Kepala Desa dalam memenuhi target dan jadwal pencapaian program pemerintahan atasannya didesa Kuala Enok termasuk pada kategori “Kurang Mampu” sebanyak 23 responden atau 45,09% dan tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” sebanyak 16 responden atau 31,37% sedangkan “Mampu” sebanyak 12 responden atau 23,52% dari keseluruhan jumlah responden.

Dari hasil tanggapan responden pada tabel 5.13 penulis dapat menganalisis peran Kepala Desa dalam memenuhi target dan jadwal pencapaian program atau peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintahan atasannya masih kurang baik, hal ini disebabkan karena

Kepala Desa dianggap masih lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga pelaksanaan tugas dari pemerintahan atasannya tidak berjalan sesuai dengan jadwal dan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan dalam pelaksanaan program baik berupa pembangunan infrastruktur ataupun pelaksanaan kebijakan menurut masyarakat juga terkadang timbul penyimpangan yang menyebabkan lambatnya penyelesaian tugas yang diembankan kepada Kepala Desa.

**Tabel 5.14 : Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Kepala Desa Menjadi Perantara Bagi Masyarakat Dalam Menyuarakan Aspirasi Kepada Pemerintahan Atasannya.**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mampu	13	25,49%
2.	Cukup Mampu	17	33,33%
3.	Kurang Mampu	21	41,17%
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Tahun 2013**

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan Kepala Desa menjadi perantara bagi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi kepada pemerintahan atasannya didesa Kuala Enok termasuk pada kategori “Kurang Mampu” sebanyak 21 responden atau 41,17% dan tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” sebanyak 17 responden atau 33,33% sedangkan “Mampu” sebanyak 13 responden atau 25,49% dari keseluruhan jumlah responden.

Dan tanggapan reponden dalam hal ini Kepala Desa sebagai pelaksana tugas pemerintah atasannya ialah “Kurang Mampu” menjadi perantara yang baik bagi masyarakat

desa yang ingin menyampaikan keinginan atau permasalahan desa kepada pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya. Dari hasil inilah, maka penulis menyimpulkan bahwa Kepala Desa belum cukup mampu menjadi perantara antara pemerintahan atasannya dan masyarakat desa dalam menjalin komunikasi yang baik agar juga memudahkan untuk terlaksananya pembangunan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

**Tabel 5.15 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kepala Desa Sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan Atasannya**

No	Kategori			Jumlah
	Mampu	Cukup Mampu	Kurang Mampu	
1	13 (25,49%)	16 (31,37%)	22 (43,13%)	51
2	12 (23,52%)	16 (31,37%)	23 (45,09%)	51
3	13 (25,49%)	17 (33,33%)	21 (41,17%)	51
<b>Rata-Rata</b>	<b>13</b> <b>(25,49%)</b>	<b>16</b> <b>(31,37)</b>	<b>22</b> <b>(43,13%)</b>	<b>51</b> <b>(100%)</b>

**Sumber : Data Olahan Tahun 2013**

Dari hasil tanggapan responden yang direkapitulasi tentang variable penelitian Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan Atasannya Desa Kuala Enok Kec. Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, ternyata hasil penelitian dapat diketahui : tanggapan responden pada kategori “Kurang Mampu“ ada 22 responden atau 43,13% dan tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” ada 16 responden atau 31,37% serta tanggapan reponden pada kategori “Mampu” ada 13 responden atau 25.49% dari keseluruhan jumlah responden.

Dari hasil penelitian tersebut ternyata fungsi Kepala Desa sebagai pelaksana tugas pemerintahan atasannya di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir termasuk pada kategori “Kurang Mampu” yaitu ada 22 orang responden atau 43,13% yang memberikan tanggapannya dari 51 orang jumlah responden masyarakat secara keseluruhan.

#### **5.2.4 Kepala Desa Sebagai Kordinator Terhadap Jalannya Pemerintahan dan Pembangunan Desa**

Kepala Desa dituntut mampu mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan desa (melakukan pembagian tugas terhadap aparat desa dan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan) mengambil keputusan dengan memberikan alternatif-alternatif terbaik bagi masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada di desa serta tegas dengan keputusan yang diambil dan tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak lain dan mampu mengajak serta masyarakat untuk duduk bersama untuk bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa Kuala Enok.

Pelaksanaan pembangunan desa akan berhasil apabila Kepala Desa mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan dan membentuk kelompok-kelompok pembagian tugas kepada aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa itu sendiri. Mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa, selalu bekerjasama dan saling bertanggung jawab antara Kepala Desa dengan masyarakat desa.

**Tabel 5.16      Tanggapan Responden Desa Kuala Enok mengenai Kemampuan Kepala Desa Sebagai Kordinator Jalannya Pemerintahan di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mampu	16	31,37%
2.	Cukup Mampu	24	47,05%
3.	Kurang Mampu	11	21,56%
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Tahun 2013**

Dari tabel 5.7 dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan Kepala Desa dalam mengkoordinir jalannya pemerintahan pada desa Kuala Enok termasuk pada kategori “Cukup Mampu “ sebanyak 24 responden atau 47,05% dan tanggapan responden yang memilih kategori “Mampu” sebanyak 16 responden atau 31,37% sedangkan pada kategori pilihan jawaban “ Kurang Mampu” sebanyak 11 responden atau 21,56% dari jumlah keseluruhan responden.

Adapun tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” lebih banyak dikarenakan Kepala Desa memiliki kemampuan dalam mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan desa dengan membentuk kelompok-kelompok dan pembagian tugas terhadap aparat desa dan masyarakat, tetapi Kepala Desa belum cukup tegas dalam memerintahkan, mengarahkan dan mengawasi pekerjaan kelompok-kelompok yang telah dibuatnya tersebut, sehingga terkadang pelaksanaan program yang berjalan tidak selesai dengan dengan tepat waktu sesuai dengan apa

yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini juga menurut Kepala Desa sendiri bahwa masyarakat sulit diberi tugas dan lalai dengan tugas yang diberikan. Maka kesimpulan hasil penelitian pada desa Kuala Enok, Kepala Desa cukup mampu dalam mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan baik, hanya saja Kepala Desa kurang tegas dalam melaksanakan pengawasan dari pelaksanaan koordinasi terhadap kelompok yang telah dibuatnya.

**Tabel 5.17    Tanggapan Responden mengenai Kemampuan Kepala Desa Dalam Menempatkan aparatur desa sesuai bidang keahlian masing-masing di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mampu	14	27,45%
2.	Cukup Mampu	27	52,94%
3.	Kurang Mampu	10	19,60%
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Tahun 2013**

Dari tabel 5.17 dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan Kepala Desa dalam menempatkan aparatur desa sesuai bidang keahlian masing-masing termasuk pada kategori “Cukup Mampu “ sebanyak 27 responden atau 52,94% dan tanggapan responden yang memilih kategori “Mampu” sebanyak 14 responden atau 27,45% sedangkan pada kategori pilihan jawaban “Kurang Mampu” sebanyak 10 responden atau 19,60% dari jumlah keseluruhan responden.

Adapun tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” lebih banyak, berdasarkan hal ini dapat penulis simpulkan dari hasil penelitian Kepala Desa dianggap cukup memiliki kemampuan dalam mengkoordinir penempatan aparatur desa sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing sehingga penyelenggaraan kegiatan administrasi di desa menurut masyarakat telah berjalan dengan cukup baik .

**Tabel 5.18    Tanggapan Responden mengenai Kemampuan Kepala Desa Bekerjasama Dengan BPD Dalam Merumuskan Kebijakan Pembangunan Desa Kuala Enok**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mampu	16	31,37%
2.	Cukup Mampu	21	41,17%
3.	Kurang Mampu	14	27,45%
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Tahun 2013**

Dari tabel 5.18 dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan Kepala Desa dalam bekerjasama dengan badan permusyawaratan desa (BPD) untuk merumuskan kebijakan pembangunan Desa Kuala Enok termasuk pada kategori “Cukup Mampu” sebanyak 21 responden atau 41,17% dan tanggapan responden yang memilih kategori “Mampu” sebanyak 16 responden atau 31,37% sedangkan pada kategori pilihan jawaban “Kurang Mampu” sebanyak 14 responden atau 27,45% dari jumlah keseluruhan responden.

Adapun tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” lebih banyak, berdasarkan hal ini dapat penulis simpulkan dari hasil penelitian bahwa Kepala Desa dianggap cukup memiliki kemampuan dalam bekerjasama dengan BPD dalam merumuskan kebijakan pembangunan di desa Kuala Enok, penulis juga melihat dilapangan adanya kemampuan Kepala Desa dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan para anggota BPD memudahkan Kepala Desa dalam mengeluarkan kebijakan yang akan dilaksanakannya.

**Tabel 5.19 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kepala Desa Sebagai Kordinator Pemerintahan dan Pembangunan Desa**

No	Kategori			Jumlah
	Mampu	Cukup Mampu	Kurang Mampu	
1	16 (31,37%)	24 (47,05%)	11 (21,56%)	51
2	14 (27,45%)	27 (52,94%)	10 (19,60%)	51
3	16 (31,37%)	21 (41,17%)	14 (27,45%)	51
<b>Rata-Rata</b>	<b>15</b> <b>(29,41%)</b>	<b>24</b> <b>(47,05%)</b>	<b>12</b> <b>(23,52%)</b>	<b>51</b> <b>(100%)</b>

**Sumber : Data Olahan Tahun 2013**

Dari hasil tanggapan responden yang direkapitulasi tentang variable penelitian Kepala Desa sebagai Kordinator Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Kuala Enok Kec. Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, ternyata hasil penelitian dapat diketahui : tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu“ ada 24 responden atau 47,05% dan tanggapan responden pada kategori “Mampu” ada 15



responden atau 29,41% serta tanggapan responden pada kategori “Kurang Mampu” ada 12 responden atau 23,52% dari keseluruhan jumlah responden.

Dari hasil penelitian tersebut ternyata fungsi Kepala Desa sebagai kordinator penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir termasuk pada kategori “Cukup Mampu” yaitu ada 24 orang responden atau 47,05% yang memberikan tanggapannya dari 51 orang jumlah responden masyarakat secara keseluruhan.

#### **5.2.5 Kepala Desa Sebagai Pelaksana Tugas dan Tanggung Jawab dibidang pemerintahan pembangunan dan Kemasyarakatan**

Kepala Desa adalah sosok yang terdepan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di suatu desa, berhasil tidaknya hal itu tidak akan terlepas dari kemampuan dan kesungguhan seorang Kepala Desa dalam memikul tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Kepala Desa dituntut memiliki kemampuan untuk menjadi perencana, pengarah, pengawas agar pelaksanaan program atau kebijakan yang akan digulirkannya berjalan dengan semestinya.

Dari beberapa fungsi kepemimpinan yang telah dikemukakan diatas sebagai seorang pemimpin, Kepala Desa harus mampu menjaga dan meminimalkan sekecil mungkin potensi konflik yang akan terjadi, bertanggung jawab apabila terjadi konflik. Mampu menjadi penengah dan mampu menyelesaikan konflik dengan baik.

Dengan demikian Kepala Desa sebagai pemimpin dapat menciptakan suasana yang baik dan kondusif tanpa ada kesenjangan, perselisihan antara masyarakat, dengan begitu program pembangunan yang ada di desa akan berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan berarti.

**Tabel 5.20 : Tanggapan Responden Desa Kuala Enok mengenai Kemampuan Kepala Desa Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mampu	9	17,64%
2.	Cukup Mampu	17	33,33%
3.	Kurang Mampu	25	49,01%
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Tahun 2013**

Berdasarkan Tabel 5.20 diatas, dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik itu dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa Kuala Enok termasuk pada kategori “Kurang Mampu” dimana 25 responden atau sebanyak 49,01%, dan tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” sebanyak 17 responden atau 33,33%. Sedangkan pada kategori alternatif jawaban “Mampu” sebanyak 9 responden atau 17,64% dari keseluruhan jumlah responden dalam penelitian ini.

Adapun tanggapan responden yang memilih alternatif “Kurang Mampu” lebih banyak, penulis lihat dilapangan adalah dikarenakan Kepala Desa belum cukup mampu melakukan upaya yang nyata dibidang pembangunan dan melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang Kepala Desa sehingga apa yang menjadi janjinya sebelum terpilih menjadi Kepala Desa tidak terlaksana dengan baik dan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat desa.

**Tabel 5.21 : Tanggapan Responden mengenai Kemampuan Kepala Desa Menjadi Pengayom Yang Baik dan Mengerti Apa Yang Menjadi Keinginan dan Kebutuhan Masyarakat Desa.**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mampu	13	25,49%
2.	Cukup Mampu	18	35,29%
3.	Kurang Mampu	20	39,21%
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Tahun 2013**

Berdasarkan Tabel 5.21 diatas, dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan Kepala Desa menjadi pengayom yang baik dan mengerti apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan Masyarakat Desa Kuala Enok termasuk pada kategori “Kurang Mampu” 20 responden atau sebanyak 39,21%, dan tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” sebanyak 19 responden atau 35,29%. Sedangkan pada kategori alternatif jawaban “Mampu” sebanyak 13 responden atau 25,49% dari keseluruhan jumlah reponden dalam penelitian ini.

Adapun tanggapan responden yang memilih alternatif “Kurang Mampu” lebih banyak, penulis lihat dilapangan adalah dikarenakan Kepala Desa dinilai Kurang tanggap dan peduli dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat dan masyarakat juga menilai Kepala Desa belum teliti dalam memilih apa yang harus diprioritaskan dalam pelaksanaan realisasi keinginan masyarakat tersebut.

**Tabel 5.22 : Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan Kepala Dalam Melaksanakan Pengawasan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Didesa Kuala Enok**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase (%)
1.	Mampu	8	15,68%
2.	Cukup Mampu	18	35,29%
3.	Kurang Mampu	25	49,01%
<b>Jumlah</b>		<b>52</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Data Olahan Tahun 2013**

Berdasarkan Tabel 5.22 diatas, dapat diketahui tanggapan responden mengenai kemampuan Kepala Desa dalam melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan di desa Kuala Enok termasuk pada kategori “Kurang Mampu” 25 responden atau sebanyak 49,01%, dan tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” sebanyak 18 responden atau 35,29%. Sedangkan pada kategori alternatif jawaban “Mampu” sebanyak 8 responden atau 15,68% dari keseluruhan jumlah reponden dalam penelitian ini.

Adapun tanggapan responden yang memilih alternatif “Kurang Mampu” lebih banyak, penulis lihat dilapangan adalah dikarenakan Kepala Desa kurang tanggap dan tidak peduli dengan adanya penyimpangan yang terjadi dilokasi pembangunan. Pengawasan adalah hal yang mutlak dilakukan karena disitulah sumber permasalahan pembangunan desa sering terjadi dan menuntut kesigapan seorang Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pembangunan yang ada di desa yang dipimpinnya.

**Tabel 5.23 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Kepala Desa Sebagai Pelaksana Tugas dan Tanggung Jawab**

No	Kategori			Jumlah
	Mampu	Cukup Mampu	Kurang Mampu	
1	9 (17,64%)	17 (33,33%)	25 (49,01%)	51
2	13 (25,49%)	18 (35,29%)	20 (39,21%)	51
3	8 (15,68%)	18 (35,29%)	25 (49,01%)	51
<b>Rata-Rata</b>	<b>10 (19,60%)</b>	<b>18 (35,29%)</b>	<b>23 (45,09%)</b>	<b>51 (100%)</b>

**Sumber : Data Olahan Tahun 2013**

Dari hasil tanggapan responden yang direkapitulasi tentang variable penelitian Kepala Desa sebagai pelaksana tugas dan tanggung jawab dibidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan didesa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, ternyata hasil penelitian dapat diketahui : tanggapan responden pada kategori “Kurang Mampu“ dimana ada 23 responden atau 45,09%

dan tanggapan responden pada pada kategori “Cukup Mampu” ada 18 responden atau 35,29% dari keseluruhan jumlah responden sedangkan pada kategori “Mampu” ada 10 responden atau sebanyak 19,60%.

Dari hasil penelitian tersebut ternyata fungsi Kepala Desa sebagai pelaksana tugas dan tanggung jawab dibidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir termasuk pada kategori “Kurang Mampu” yaitu ada 23 orang responden atau 45,09% yang memberikan tanggapannya dari 51 orang jumlah responden masyarakat secara keseluruhan.

### **5.3. Rekapitulasi Data Penelitian**

Dari Indikator-indikator variable pada penelitian ini, maka selanjutnya dapat penulis simpulkan rekapitulasi data mengenai tanggapan responden terhadap Kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir dimana seorang Kepala Desa harus mampu menjadi penggerak potensi sumber daya masyarakat desa, mampu menjadi Pembina Perekonomian masyarakat, mampu melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya, mampu mengkoordinir jalannya pemerintahan dan pembangunan desa dan mampu mengemban tanggung jawab dalam kepemimpinannya adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.24 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Analisis Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Indikator	Tanggapan Responden			Jumlah
		Mampu	C.Mampu	K.Mampu	
1	Penggerak Potensi Sumber Daya Masyarakat Desa	12 (23,52%)	17 (33,33%)	22 (43,13%)	51 (100%)
2	Pembina Perekonomian Masyarakat Desa	11 (21,56%)	15 (29,41%)	25 (49,01%)	51 (100%)
3	Pelaksana Tugas Pemerintahan Atasannya	13 (25,49%)	16 (31,37%)	22 (43,13%)	51 (100%)
4	Kordinator Pelaksana Pemerintahan dan Pembangunan	15 (29,41%)	24 (47,05%)	12 (23,52%)	51 (100%)
5	Pelaksana Tanggung Jawab Pemerintahan	10 (19,60%)	18 (35,29%)	23 (45,09%)	51 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>61</b>	<b>90</b>	<b>104</b>	<b>255</b>
<b>Rata-Rata Persentase (%)</b>		<b>12 (23,52%)</b>	<b>18 (35,29%)</b>	<b>21 (41,17)</b>	<b>51 (100%)</b>

**Sumber : Data Olahan Tahun 2013**

Tabel 5.24 diatas merupakan rekapitulasi tanggapan responden tentang indikator penelitian Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Kuala Enok Kec.Tanah Merah Kab.Indragiri Hilir, ternyata hasil penelitian dapat diketahui bahwa: Tanggapan responden pada kategori “Kurang Mampu“ ada 21 responden atau 41% dan tanggapan responden pada pada kategori “Cukup Mampu” ada 18 responden atau 35,29% sedangkan pada kategori “Mampu” ada 12 responden atau sebanyak 23,52% dari keseluruhan jumlah responden.

Dari hasil penelitian tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Analisis Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir adalah “Kurang Mampu” dimana ada 21 responden atau sebanyak 41,17% dari total 51 orang jumlah responden secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena Kepala Desa belum sepenuhnya mampu menjalankan 5 fungsi Kepemimpinannya sesuai dengan indikator-indikator yang penulis teliti.

Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan tokoh ekonomi yang ada di Desa Kuala Enok tentang bagaimana sikap Lurah dalam hal menyikapi permasalahan ekonomi yang ada didesa adalah :

“Dalam menyikapi permasalahan yang ada, Kepala Desa sebelumnya telah menjelaskan sebab turunnya harga komoditas utama perkebunan didesa seperti harga Kelapa, tapi kedepannya Kepala Desa kurang berperan serta mengajak masyarakat untuk duduk bersama bermusyawarah agar bersama-sama mencari solusi atau cara terbaik agar dapat menaikkan kembali harga komoditas kelapa tersebut atau setidaknya mencari cara agar masyarakat tidak terlalu terpuruk menghadapi turunnya harga kelapa yang menjadi salah satu tumpuan utama ekonomi masyarakat didesa kuala enok (Dari Agen Distributor/Toke Kelapa di Desa Kuala Enok)”.

Berikut juga adalah hasil wawancara penulis dengan tokoh agama dusun Kampung Baru tentang bagaimana peran Kepala Desa dalam memajukan dan mengembangkan agama Islam, kenapa penulis mengambil contoh agama Islam ialah



tidak lain karena mayoritas dari agama yang dianut oleh masyarakat desa Kuala Enok adalah agama islam dan juga karena Kepala Desa adalah penganut agama Islam itu sendiri.

“Menurutnya dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim, Kepala Desa telah menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat dalam hal tingkah laku, adab serta dalam melaksanakan tugas ibadahnya telah cukup baik. Sedangkan yang harus ditingkatkan lagi adalah Kepala Desa agar meningkatkan tingkat kehadirannya dalam pertemuan agama baik itu dalam rangka pengajian rutin ataupun kegiatan lainnya yang sering diadakan dimasjid-masjid ataupun mushalla yang ada didesa Kuala Enok, jangan hanya kehadirannya diwakilkan saja oleh aparat desa (Imam Masjid Al-Mujahidin Kampung Baru)”.

Adapun hasil wawancara penulis desa tentang seperti apa Kepala Desa dalam memberikan arahan serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat desa yaitu :

“Kepala Desa memang menjelaskan tujuan dari pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat melalui MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) desa, tetapi Kepala Desa tidak membuat langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan. Seharusnya Kepala Desa itu membuat langkah-langkah misalnya : dalam pengerjaan apa-apa saja yang mesti didahulukan, dalam pengadaan bahan material, kapan bahan tersebut harus tiba dilokasi pembangunan, kemudian peralatan apa yang perlu diutamakan, dan setelah pembangunan berjalan Kepala Desa

harus mampu melaksanakan fungsinya sebagai pengawas pembangunan, jangan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada pelaksana proyek (Ketua BPD Desa Kuala Enok)”

#### **5.4. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepala Desa Dalam Menjalankan Perannya Sebagai Seorang Pemimpin Dalam Pembangunan Desa Kuala Enok.**

Dari hasil penelitian terhadap responden terdapat hambatan bagi Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan dari berbagai indikator penelitian. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan pembangunan harus terjadi adanya kerjasama antara Kepala Desa dengan masyarakat agar semua yang direncanakan dapat tercapai dengan baik. Hambatan yang dilalui oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

##### **1. Kepala Desa Selaku Penggerak Potensi Masyarakat**

Mengingat besarnya potensi yang ada baik itu sumber daya didesa Kuala Enok peran seorang pemimpin sangat diperlukan untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat, namun dalam memberikan pengarahan masih banyak diantaranya yang tidak memahami dan tidak mau menerima pengarahan yang disampaikan Kepala Desa, sehingga sampai saat ini dalam kepemimpinannya Kepala Desa masih belum mampu sepenuhnya

menggerakkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di desa Kuala Enok dengan hasil yang maksimal.

2. Kepala Desa sebagai Pembina Perekonomian Masyarakat

Dalam mengajak masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dalam merumuskan cara untuk mengembangkan dan menyelesaikan permasalahan ekonomi desa. Sering terjadi perbedaan pendapat diantara masyarakat, sehingga menimbulkan kebuntuan dalam menciptakan solusi yang tepat bagi program-program perekonomian kepada masyarakat.

3. Kepala Desa Sebagai Pelaksana Tugas dari Pemerintahan Atasannya

Kepala Desa dituntut mampu menjadi kepanjangan tangan pemerintahan atasannya dalam menyelenggarakan program yang akan dilaksanakan, sering terjadinya kesalahpahaman

4. Kepala Desa Sebagai Koordinator penyelenggaraan Desa

Pelaksanaan pembangunan desa akan berhasil apabila Kepala Desa mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan dan membentuk kelompok-kelompok pembagian tugas kepada aparat desa, dan masyarakat desa itu sendiri. Selalu bekerjasama dan saling bertanggung jawab antara Kepala Desa dengan masyarakat desa. Tetapi dalam pelaksanaan Kepemimpinanya, Kepala Desa sering dihadapkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat yang telah ditunjuk untuk bekerjasama, masyarakat hanya mau berpartisipasi apabila diberi upah atau gaji.

5. Kepala Desa sebagai pelaksana tugas dan tanggung jawab dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa

Dalam hal ini yang menjadi hambatan ialah kurangnya kemampuan Kepala Desa menjadi penggerak dalam setiap kebijakan yang baru dalam pelaksanaan pembangunan maupun dalam pemerintahan desa karena keterbatasan kemampuan. Dan juga kurangnya kemampuan Kepala Desa dalam mengambil hati masyarakat yang berakibat timbulnya sikap acuh dan tidak peduli karena tidak tersalurkan apa yang menjadi harapan dari masyarakat.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang diperoleh kemudian dilakukan analisis serta pembahasan hasil dari penelitian ini. Maka penulis menarik kesimpulan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa dalam pembangunan desa Kuala Enok masih kurang baik, hal ini disebabkan Kepala Desa Belum mampu menjalankan keseluruhan dari kelima fungsi Kepala Desa diantaranya sebagai berikut :

1. Dari seluruh jawaban responden mengenai variabel Kepala Desa sebagai penggerak potensi masyarakat, secara keseluruhan pada penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden pada variabel ini termasuk pada kategori “Kurang Mampu“ yaitu ada 22 responden atau 43,13% dan sedangkan tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” ada 17 responden atau 33,33% serta tanggapan reponden pada kategori “Mampu” ada 12 responden atau 23,52% dari keseluruhan jumlah responden.
2. Dari seluruh jawaban responden mengenai variabel Kepala Desa sebagai Pembina dibidang ekonomi masyarakat, secara keseluruhan pada penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden pada variabel ini termasuk pada kategori “Kurang Mampu“ yaitu ada 25 responden atau 49,01% sedangkan tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” ada 15 responden atau

29,41% serta tanggapan responden pada kategori “Mampu” ada 11 responden atau 21,56 % dari keseluruhan jumlah responden..

3. Dari seluruh jawaban responden mengenai variabel Kepala Desa sebagai pelaksana tugas pemerintahan atasannya, secara keseluruhan pada penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden pada variabel ini termasuk pada kategori “Kurang Mampu” yaitu ada 22 responden atau 43,13% sedangkan tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” ada 16 responden atau 31,37% serta tanggapan responden pada kategori “Mampu” ada 13 responden atau 25,49% dari keseluruhan jumlah responden.
4. Dari seluruh jawaban responden mengenai variabel Kepala Desa sebagai kordinator Desa, secara keseluruhan pada penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden pada variabel ini termasuk pada kategori “Cukup Mampu” yaitu ada 24 responden atau 47,05% sedangkan tanggapan responden pada kategori “Mampu” ada 15 responden atau 29,41% serta tanggapan responden pada kategori “Kurang Mampu” ada 12 responden atau 23,52% dari keseluruhan jumlah responden.
5. Dari seluruh jawaban responden mengenai variabel Kepala Desa sebagai penanggung jawab baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, secara keseluruhan pada penelitian ini dapat diketahui tanggapan responden pada variabel ini termasuk pada kategori “Kurang Mampu” dimana ada 23 responden atau 45,09% dan tanggapan responden pada kategori “Cukup Mampu” ada 18 responden atau 35,29% dari

keseluruhan jumlah responden sedangkan pada kategori “Mampu” ada 10 responden atau sebanyak 19,60%..

Dari kelima indikator yang tersedia, maka Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikatakan pada kategori Kurang Mampu karena belum dapat menjalankan keseluruhan dari 5 fungsi Kepemimpinan Kepala Desa yang penulis titi dalam penelitian ini.

.

## **6.2. Saran**

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, untuk itu dapat penulis sampaikan saran adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pembangunan yang ada di desa Kuala Enok diharapkan Kepala Desa agar lebih meningkatkan kapasitasnya sebagai pemimpin yang mampu memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat, agar pada akhirnya masyarakat juga dapat ikut berperan aktif dalam pembangunan desa.
2. Kepala Desa harus mampu merangkum gagasan dan ide-ide yang diberikan oleh masyarakat agar apa yang menjadi keinginan masyarakat dapat dirumuskan secara bersama-sama sesuai dengan harapan masyarakat desa.
3. Kepala Desa dituntut agar mampu menjadi tauladan yang baik kepada seluruh masyarakat, sesuai dengan tanggung jawab yang diterimanya sebagai seorang pemimpin.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Agustino, Leo, 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabetha
- B.N. Marbun, 2008. *Proses Pembangunan Desa*. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Beratha, I Nyoman, 1982. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Djadijono, M, dkk, 2006. *Membangun Indonesia dari Daerah*. Yogyakarta, CSIS
- Kartini, Kartono, 2004. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Kunarjo. 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Jakarta, Universitas Indonesia
- Muzani, Saiful. 1993, *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta, LP3ES
- Nawawi, Hadari dan Martini, 2006. *Kepemimpinan yang efektif*. Jogjakarta, UGM Press
- Ndraha, Taliziduhu, 2000. *Pembangunan Masyarakat*. Rineke Cipta : Jakarta
- Ndraha, Taziliduhu, 1985. *Desa dan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan*. Bandung, Alfabetha
- Riberru, J, 2003. *Dasar Kepemimpinan*. Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya
- Rivai, Veitzal, 2003. *Kepemimpinan*. Jakarta, Bumi Aksara
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah.2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Sugiono,2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabetha
- Siagian P Sondang, 2004. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara,

Siagian P Sondang, 2003. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku.*, Jakarta CV. Hajimas Agung, Jakarta

Siagian P Sondang, 2000. *Administrasi Pembangunan.* Jakarta, Bumi Aksara

Sudriamunawar, Haryono, *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan.* Bandar Maju : Bandung :2002

Sudirwo, Daeng, 1991. *Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa,* Angkasa : Bandung

Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan Sebagai Perdamaian.* Jakarta, Obor

Yulianti, Yayuk dan Mangku Purnomo, 2003. *Sosiologi Pedesaan,* Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.

### **Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang perangkat Desa di dalam pasal 1 point (g)

Undang-Undang Otonomi No 32 Tahun 2004, Sinar Grafika : Jakarta

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 tentang Otonomi Desa

Peraturan Pemerintah. No 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 7 huruf b

### **Internet**

<http://aries-pwt.blogspot.com/2004/06/kepemimpinan-kepala-desa-terhadap-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan>

<http://www.thedigilib.com/doc/105314-hubungan-gaya-kepemimpinan-kepala-desa-dan-peran-serta-masyarakat-terhadap-peningkatan-dalam-pembangunan>

<http://lenifisip.blogspot.com/2010/11/blog-post.html>

<http://fitramelisa.blogspot.com/2006/01/proposal-penelitian-peranan-kepala-desa.html>